



bpdih
Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan



PENABULU
FOUNDATION

ANNUAL REPORT

PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN BERKELANJUTAN
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENCAPAIAN
TARGET PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun 2025





Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan.....	3
1. Detail Program/Proposal.....	4
2. Kemajuan Implementasi.....	4
2.1. Kinerja Program	4
2.2. Status Implementasi Keluaran Proyek	5
2.3. Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik	77
3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender	78
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut	85
Lampiran	87



Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan

Implementasi Proyek RBP GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode Oktober 2024 hingga Desember 2025 menunjukkan kemajuan dalam penguatan arsitektur REDD+ dan fondasi kebijakan daerah, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan aktivitas fisik di lapangan. Proyek ini berjudul "Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" ini berhasil menyerap anggaran sebesar Rp14.303.745.062 dari total rencana tahunan sebesar Rp 18.929.910.038.

Capaian kunci meliputi penyusunan dokumen FREL/FRL sub-nasional, finalisasi draf Rencana Aksi REDD+, dan dokumen Safeguards, serta revitalisasi Pokja REDD+ Kalimantan Tengah. Di tingkat tapak, meskipun kegiatan penanaman belum dieksekusi, tahap persiapan telah tuntas dengan tersusunnya 40 Rencana Teknis (Rantek) untuk rehabilitasi 500 ha lahan mineral dan 500 ha lahan gambut, serta verifikasi terhadap 40 kelompok masyarakat pelaksana. Selain itu, perlindungan hutan diperkuat melalui 13 kali patroli pengamanan dan 8 kali patroli karhutla, yang didukung pengadaan sarana seperti 20 unit pompa pemadam, 2 unit drone, serta pemasangan 200 unit papan imbauan di lokasi-lokasi strategis. Tidak hanya itu penyusunan Profil Kehati untuk 2 Kabupaten Barito Selatan dan Gunung Mas, serta 1 dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Barito Selatan telah disusun.

Program ini juga mencatat keterlibatan gender yang cukup baik dengan partisipasi perempuan sekitar 35% dari total partisipatif kegiatan, serta kepatuhan terhadap prinsip PADIATAPA/FPIC dalam interaksi dengan masyarakat. Walaupun terdapat keterlambatan akibat tantangan sinkronisasi jadwal dengan OPD dan penentuan lokus kegiatan yang memakan waktu, proyek ini telah berhasil membangun kerangka administratif yang solid untuk memastikan implementasi REDD+ yang lebih terarah dan akuntabel di masa mendatang.

Palangka Raya, 17 Maret 2026

**Penanggung Jawab Kegiatan
(Yayasan Penabulu)**

EKO KOMARA KURNIAWAN

Mengetahui,
Penanggung Jawab
(Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah)



1. Detail Program/Proposal

1. Proyek	RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2	
2. Kategori	Kategori II: Kinerja ER pada 2014-2016	
3. Pelaksana	Provinsi	Kalimantan Tengah
	Nama Lemtara	Yayasan Penabulu
	Nomor Perjanjian	004/BPDLH/GCFO2/X/2024 359/PK/PENABULU/X/2024
	Periode Program	Oktober 2024 – Desember 2025
4. Periode Pelaporan	Tahun 2025	
5. Judul Proposal	Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah	
6. Total Pendanaan Program/Kegiatan (36 bulan)	(Rp) 80.212.859.927	
7. Total Dana yang Diajukan Tahun 2024 - 2025	(Rp) 18.929.910.098	
8. Total Realisasi Dana Tahun 2024 - 2025	(Rp) 13.800.595.733	

2. Kemajuan Implementasi

2.1. Kinerja Program

No. Outcome program/ proposal	Output Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2					Outcome Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2			
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OM1	OM2	OM3	OM4
Outcome 1. Mendukung Percepatan Pencapaian Target Emisi GRK	■	□	□	□	□	■	□	□	□
Outcome 2. Menguatnya Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Peningkatan Tata Kelola Kehutanan	■	□	□	□	□	■	□	■	□
Outcome 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan	□	□	■	□	□	□	■	□	□



Outcome 4. Menguatnya Kebijakan dan kelembagaan Implementasi REDD+ dan NDC	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2.2. Status Implementasi Keluaran Proyek

Implementasi Proyek RBP GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan selama kurang lebih satu tahun, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Desember 2025, dan menunjukkan progres yang relatif baik. Pelaksanaan kegiatan ini melalui implementasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, serta Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara.

Meskipun terdapat beberapa capaian kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan perencanaan tahun 2024–2025, secara umum pelaksanaan kegiatan menunjukkan perkembangan yang positif. Tidak seluruh rencana awal dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terdapat kegiatan yang belum terlaksana, serta beberapa kegiatan yang justru dilaksanakan lebih awal dari rencana semula. Kondisi ini tidak terlepas dari dinamika pelaksanaan dan kebutuhan penyesuaian di tingkat tapak. Sementara sebagian besar kegiatan lainnya telah berhasil mencapai luaran yang ditargetkan.

Kesiapan pelaksanaan penanaman di lahan mineral dan gambut telah diselesaikan melalui penyusunan 40 Rencana Teknis (Rantek) rehabilitasi lahan mineral dan gambut, serta penguatan 40 kelompok kerja penanaman yang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan penanaman. Penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati (kehati) juga telah mencapai target dengan adanya penyesuaian, yaitu dari rencana awal penyusunan 15 dokumen menjadi 2 dokumen yang disusun secara langsung, sementara 13 dokumen lainnya hanya melalui proses peninjauan (review) karena telah disusun sebelumnya. Selain itu, dokumen RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) Kabupaten Barito Selatan telah disusun. Kegiatan patroli pengamanan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga telah dilaksanakan dan diperkuat melalui pemasangan 200 papan imbauan di titik-titik strategis, serta pembentukan dan/atau penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang didukung dengan penyediaan 20 unit pompa pemadam.

Dalam rangka penguatan kelembagaan KPH/Tahura, proses telah dimulai dengan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah (IMSB), yang saat ini telah tersedia dalam bentuk draf. Sementara itu, pengembangan arsitektur REDD+ Kalimantan Tengah menunjukkan progres yang cukup baik, yang ditandai dengan revitalisasi Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalimantan Tengah, penyusunan dokumen Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Tengah, dokumen Forest Reference Level/Forest Reference Emission Level (FRL/FREL), serta dokumen Safeguards REDD+ Kalimantan Tengah yang telah selesai disusun.

Dokumen arsitektur REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun ini telah melalui serangkaian pertemuan diskusi/FGD yang melibatkan stakeholder dari unsur pemerintahan, mitra pembangunan, akademisi, serta tenaga ahli. Sejalan dengan hal tersebut, untuk Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), laporan IGRK Tahun 2024 juga telah disusun. Selain itu, dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim), telah dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan monitoring ProKlim di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, serta peningkatan kapasitas bagi beberapa kelompok kampung iklim.

Terkait aspek safeguard, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip safeguard telah dilaksanakan dalam implementasi kegiatan, yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen dan bukti pendukung yang relevan. Risiko-risiko potensial juga telah diidentifikasi sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dilengkapi dan diperkuat, secara umum pelaksanaan Proyek GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik dalam memenuhi komitmen safeguard yang ditetapkan.



Berikut disajikan rincian kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Desember 2025:

Project Output	Project Activity	Indikator	Status	Progres Implementasi (%)
1.1. Bertambahnya luas areal yang terehabilitasi)	1.1.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	500 Ha hutan dan lahan mineral telah di rehabilitasi	On Going	50%
	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada lahan mineral didukung oleh serangkaian sub kegiatan yang meliputi penyusunan Rencana Teknis (Rantek) (1.1.1.1), pembentukan kelompok kerja (1.1.1.2), pelaksanaan RHL (1.1.1.3), pemeliharaan (1.1.1.4), serta pembinaan dan pengawasan RHL (1.1.1.5). Berdasarkan rencana kerja dalam proposal, pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2025 pelaksanaan kegiatan difokuskan pada tiga sub kegiatan, yaitu penyusunan Rantek, pembentukan kelompok kerja, dan pelaksanaan RHL, sementara sub kegiatan pemeliharaan serta pembinaan dan pengawasan RHL direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pada periode 2024–2025 kegiatan yang terlaksana hanya mencakup penyusunan Rantek dan pembentukan kelompok kerja, sedangkan pelaksanaan RHL berupa penanaman belum dapat dilaksanakan. Di sisi lain, satu sub kegiatan yang semula direncanakan pada tahun 2026, yaitu pembinaan RHL dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) RHL, telah dilaksanakan lebih awal. Dengan demikian, dari lima sub kegiatan RHL, hingga akhir tahun 2025 telah terlaksana tiga sub kegiatan, yaitu penyusunan Rantek, pembentukan kelompok kerja, serta pembinaan RHL. Berikut disajikan capaian kegiatan pada aktivitas 1.1.1:		Sampai dengan pelaporan ini, status capaian aktivitas utama masih dalam proses (on going).	
	1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	20 Rencana Teknis RHL	Tercapai	100%
	Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk lahan (mineral) ini dilaksanakan secara bertahap sejak akhir tahun 2024 hingga akhir tahun 2025. Tahapan prakondisi dimulai pada 23 Desember 2024 melalui rapat koordinasi untuk menyepakati penetapan lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal Perhutanan Sosial (PS) serta			Sampai dengan pelaporan ini, capai kegiatan telah mencapai target, dengan disusunnya 20 dokumen Rantek RHL di lahan mineral.



	melakukan analisis spasial guna mencegah terjadinya tumpang tindih lokasi pelaksanaan. Rencana Teknis (Rantek) yang disusun merupakan skema Jangka Benah, yang menysasar wilayah dan jenis tanaman tertentu sesuai karakteristik tapak dan kebutuhan kelompok. Meskipun pendekatan Jangka Benah belum secara eksplisit terakomodasi dalam skema RHL nasional, metode ini diusung untuk memastikan kegiatan penanaman pada areal Perhutanan Sosial dapat diakui dan menjadi bagian dari sistem rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional. Pendekatan Jangka Benah sendiri bersifat mandatori dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Pelaksanaan penanaman pada lokasi Perhutanan Sosial menjadi penguatan dalam Rencana Aksi Penanaman yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) masing-masing kelompok. Dengan demikian, kegiatan yang direncanakan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen perencanaan resmi kelompok Perhutanan Sosial. Memasuki awal tahun 2025, dilakukan penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis penyusunan dokumen Rencana Teknis (Rantek) RHL Jangka Benah yang dilaksanakan pada 27 Februari – 1 Maret 2025 dan diikuti oleh 48 partisipan, termasuk kunjungan lapangan ke lokasi demplot jangka benah sawit di Desa Karang Saro, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan ini juga melibatkan partisipan yang akan fokus pada RHL gambut. Proses berlanjut dengan tahapan PADIATAPA (Free, Prior, and Informed Consent) dan pengambilan data awal pada 11 - 12 Juni 2025 di Kota Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, dimana beberapa kelompok masyarakat menyatakan kesediaan untuk menjadi pelaksana dan menyediakan lokasi kegiatan. Pada periode Juli hingga Agustus 2025, tim melakukan survei lapangan secara intensif di 20 lokasi PS yang tersebar di lima KPH (Mentaya Hulu Seruyan Tengah, Mentaya Tengah Seruyan Hilir, Katingan Hilir, Kahayan Tengah, dan Kahayan Hulu) untuk memverifikasi luas lahan total 500 hektar serta menentukan pola tanam yang sesuai. Seluruh rangkaian kegiatan ini diselesaikan pada triwulan keempat melalui pengambilan data terakhir di wilayah KPH Kahayan Hulu dan Kahayan Tengah pada 8 - 17 Oktober 2025, yang kemudian ditutup dengan		
--	--	--	--



	finalisasi 20 dokumen Rencana Teknis RHL Mineral pada bulan November 2025 yang menyepakati penanaman jenis pohon serbaguna (<i>Multi-Purpose Tree Species</i>) seperti jengkol, durian, dan tengkawang. Dalam prosesnya, penyusunan Rantek dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dan didampingi langsung oleh KPH. Proses ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi kelompok Perhutanan Sosial, mengingat konsep Rantek yang bersifat teknokratis pada awalnya tidak mudah dipahami. Pendampingan intensif diperlukan agar kelompok dapat memahami aspek teknis seperti penentuan jenis tanaman, pola tanam, serta tahapan pelaksanaan Jangka Benah. Pada tahap awal, proses penyusunan Rantek cukup memakan waktu, terutama dalam menentukan pihak yang berwenang menyusun dokumen Jangka Benah pada areal Perhutanan Sosial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan: Dinas Kehutanan Provinsi hanya berwenang melaksanakan kegiatan RHL di luar kawasan hutan, sementara areal Perhutanan Sosial berada di dalam kawasan hutan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan penanaman RHL pada wilayah perizinan (PS). Kondisi ini menimbulkan dinamika dan tarik ulur dalam penyusunan Rantek. Sebagai solusi, disepakati bahwa proposal kegiatan disusun dengan tujuan utama memperbaiki tutupan lahan sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diputuskan sepenuhnya dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial, dengan pendampingan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan serta KPH (KPH Mentaya Hulu Seruyan Tengah, KPH Mentaya Tengah Seruyan Hilir dan KPH Katingan Hilir). Sepanjang proses tersebut, koordinasi dan konsultasi juga dilakukan secara intensif dengan BP DAS Kahayan dan Balai Perhutanan Sosial Seksi I Palangka Raya untuk memastikan kesesuaian regulasi dan sinkronisasi kebijakan. Selama proses ini, telah terlibat sebanyak lebih kurang 582 laki-laki dan 96 perempuan.			
	1.1.1.2. Pembentukan Kelompok Tani Pelaksana RHL	20 Kelompok RHL (mineral)	Tercapai	100%
	Pembentukan Kelompok Tani Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di lahan mineral, yang sebelumnya berstatus belum		Sampai dengan pelaporan ini, target dari sub aktivitas telah tercapai dengan adanya 20	



	terlaksana hingga pertengahan tahun 2025, telah diselesaikan secara intensif pada Q4 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas 20 kelompok masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial (PS) agar proses pemulihan ekosistem di lahan mineral berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Proses fasilitasi mencakup pendataan awal, identifikasi kesiapan kelompok, serta verifikasi kelengkapan dokumen pendukung rencana pelaksanaan RHL setelah Surat Keputusan (SK) kelompok diterbitkan. Rangkaian verifikasi dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah kerja KPH. Pada periode 5–11 Desember 2025, tim melakukan verifikasi terhadap kelompok di wilayah KPH Katingan Hilir, KPH Mentaya Hulu Seruyan Tengah, dan KPH Mentaya Tengah Seruyan Hilir. Selanjutnya, pada 15 - 19 Desember 2025, kegiatan difokuskan pada 11 kelompok kerja di wilayah KPH Mentaya Tengah Seruyan Hilir. Seluruh rangkaian ini ditutup dengan verifikasi empat kelompok terakhir dari KPH Kahayan Hulu dan KPH Kahayan Tengah yang dilaksanakan bersamaan dengan agenda bimbingan teknis RHL pada 22 - 23 Desember 2025. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memverifikasi 20 kelompok tani pelaksana dengan keterlibatan 33 laki-laki dan 6 perempuan, yang kini dinyatakan siap untuk melanjutkan ke tahapan penyusunan proposal dan penanaman melalui skema swakelola.		kelompok pelaksana/ RHL di lahan mineral.
1.1.1.3. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50.000 batang tertanam di 500 hektar tertanam	Belum terlaksana	0%
Sub kegiatan ini belum dilaksanakan, mengingat tahap proses penanaman baru sampai pada kesiapan kelompok untuk memulai proses penanaman.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
1.1.1.5. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan RHL	2 kali Bimtek 20 kali perjadin Pembinaan RHL	On Going	5%
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada awalnya dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Namun, berdasarkan proses pelaksanaan dan kebutuhan di tingkat tapak, kelompok kerja yang telah dibentuk untuk kegiatan penanaman RHL pada lahan mineral memerlukan bimbingan teknis lebih awal terkait tahapan pelaksanaan RHL serta persiapan kegiatan penanaman. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan standar teknis, perencanaan, dan regulasi yang berlaku.		Sampai dengan pelaporan ini, untuk capaian kegiatan telah dilakukan 1 kali bimtek RHL mineral yang bersamaan dengan rencana bimtek RHL gambut (sub kegiatan 1.1.2.5).	



	Sebagai catatan, kegiatan ini dilakukan bersamaan (digabung) dengan kegiatan pembinaan dan pengasawan RHL di lahan gambut (sub kegiatan 1.1.2.5). Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan melalui agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan RHL Swakelola yang diselenggarakan pada 22 - 23 Desember 2025 di Kota Palangka Raya, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini mengintegrasikan pembinaan RHL pada lahan mineral dan lahan gambut sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemulihan ekosistem secara menyeluruh. Kegiatan ini melibatkan 143 peserta (122 laki-laki dan 21 perempuan) yang berasal dari 40 Kelompok Perhutanan Sosial, di mana mereka menerima pembekalan strategis dari berbagai narasumber ahli. Materi pembinaan mencakup kebijakan jangka benah dari Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru, serta standar perencanaan dan penilaian keberhasilan penanaman dari BPDAS Kahayan. Secara khusus, kelompok pelaksana lahan mineral mendapatkan pendalaman teknis dari Bidang DASRHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai metode pembersihan jalur tanam, teknik pembuatan lubang, hingga prosedur pemeliharaan bibit yang optimal di lapangan. Sebagai langkah akhir dalam pengawasan administrasi, tim Yayasan Penabulu membekali kelompok dengan mekanisme pelaporan keuangan melalui skema Swakelola Tipe IV serta melakukan reviu mendalam terhadap proposal kelompok. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan verifikasi dokumen rencana teknis serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Swakelola antara Yayasan Penabulu dan kelompok pelaksana RHL mineral di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, dan Gunung Mas. Dengan tuntasnya tahap pembinaan ini, seluruh kelompok pelaksana kini dinyatakan memiliki kesiapan teknis dan administratif untuk memulai proses penanamandi tingkat tapak pada periode mendatang.		
--	--	--	--



[Foto. Padiatapa dan pengumpulan data awal penyusunan rancangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan pada lokasi perhutanan sosial di wilayah UPT KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir tanggal 11 – 12 Juni 2025]

1.1.2. Rehabilitasi lahan Gambut	500 Ha lahan gambut telah di rehabilitasi	On Going	50%
Kegiatan Rehabilitasi lahan gambut ini memiliki serangkaian sub kegiatan dengan pola yang sama dengan rehabilitasi lahan mineral, yaitu penyusunan Rencana Teknis (Rantek) gambut (1.1.2.1), pembentukan kelompok kerja RHL gambut (1.1.2.2), pelaksanaan RHL gambut (1.1.2.3), pemeliharaan (1.1.2.4), serta pembinaan dan pengawasan RHL (1.1.2.5). Berdasarkan rencana kerja dalam proposal, pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2025 pelaksanaan kegiatan difokuskan pada tiga sub kegiatan, yaitu penyusunan Rantek gambut, pembentukan kelompok kerja RHL gambut, dan pelaksanaan RHL gambut, sementara sub kegiatan pemeliharaan serta pembinaan dan pengawasan RHL gambut direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pada periode 2024–2025 kegiatan yang terlaksana hanya mencakup penyusunan Rantek dan pembentukan kelompok kerja, sedangkan		Sampai dengan pelaporan ini, status capaian aktivitas utama masih dalam proses (on going).	



	pelaksanaan RHL berupa penanaman belum dapat dilaksanakan. Sama dengan RHL mineral, satu sub kegiatan yang semula direncanakan pada tahun 2026, yaitu pembinaan RHL gambut dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) RHL gambut, telah dilaksanakan lebih awal/bersamaan dengan bimbingan RHL mineral. Dengan demikian, dari lima sub kegiatan RHL gambut, hingga akhir tahun 2025 telah terlaksana tiga sub kegiatan, yaitu penyusunan Rantek gambut, pembentukan kelompok kerja RHL gambut, serta pembinaan RHL gambut. Berikut disajikan capaian kegiatan pada aktivitas 1.1.2:			
	1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut	20 Rencana Teknis RHL gambut	Tercapai	100%
	Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut sepanjang tahun 2025 dilakukan secara partisipatif untuk memastikan pemulihan ekosistem gambut seluas 500 hektar tepat sasaran di tingkat tapak. Rangkaian kegiatan diawali pada 19 - 20 Maret 2025 melalui proses PADIATAPA (<i>Free, Prior, and Informed Consent</i>) dan pengumpulan data awal di wilayah KPH Kapuas Kahayan, di mana kelompok masyarakat menyepakati rencana penanaman komoditas unggulan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Memasuki Q3 2025, tim melaksanakan survei lapangan secara intensif mulai 5 hingga 22 Agustus 2025 di wilayah kerja KPH Katingan Hilir dan KPH Kapuas Kahayan, mencakup lokasi seperti LPHD Tampelas, LPHD Petak Puti, dan KTH Rimba Lestari untuk menentukan pola tanam dan jenis vegetasi yang sesuai. Tahapan pengambilan data teknis diselesaikan pada Q4 2025, tepatnya pada periode 29 September hingga 10 Oktober 2025, dengan melakukan survei di delapan lokasi terakhir pada wilayah KPH Kahayan Tengah, termasuk LPHD Bukit Bamba, LPHD Pilang, dan LPHD Tuwung. Seluruh rangkaian proses ini mencapai puncaknya pada November 2025 dengan finalisasi 20 dokumen Rencana Teknis (Rantek) RHL Gambut yang telah mengakomodasi kebutuhan 20 kelompok masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial. Sebagai hasil akhir, dokumen-dokumen tersebut kini menjadi acuan legal dan teknis untuk memulai tahapan penanaman bibit guna mengembalikan fungsi hidrologis dan ekologis lahan gambut di wilayah terkait.		Sampai dengan pelaporan ini, capai kegiatan telah mencapai target, dengan disusunnya 20 rantek RHL di lahan gambut.	



	Secara umum, proses penyusunan rantek RHL gambut ini sama dengan rantek RHL mineral, termasuk pembelajaran yang dialami selama proses penyusunan.			
	1.1.2.2. Pembentukan kelompok Tani Pelaksana RHL Gambut	20 Kelompok RHL Gambut	Tercapai	100%
	Pelaksanaan Sub-Kegiatan 1.1.2.2 mengenai Pembentukan Kelompok Tani Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Gambut berhasil diselesaikan sepenuhnya pada Q4 2025 setelah melewati tahap persiapan dokumen rencana teknis pada periode sebelumnya,. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pemulihan ekosistem gambut agar program berjalan efektif dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi warga sekitar. Proses fasilitasi dilaksanakan melalui verifikasi kesiapan lapangan, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, serta identifikasi tingkat kesiapan kelembagaan pada kelompok Perhutanan Sosial (PS) terkait. Rangkaian verifikasi dilakukan secara bertahap, dimulai pada 19 - 26 November 2025 di KPH Kapuas Kayahan untuk sepuluh kelompok, dilanjutkan pada 5 - 11 Desember 2025 di wilayah KPH Katingan Hilir, dan ditutup dengan verifikasi delapan kelompok terakhir di wilayah Kahayan Tengah pada 22-23 Desember 2025 bersamaan dengan agenda Bimbingan Teknis RHL di Palangka Raya. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memverifikasi 20 kelompok pelaksana dengan total partisipasi sebanyak 86 laki-laki dan 11 perempuan. Dengan tuntasnya tahap verifikasi ini, seluruh kelompok kini dinyatakan siap secara administratif maupun teknis untuk melanjutkan ke tahapan penyusunan proposal serta pelaksanaan penanaman di areal gambut seluas 500 hektar		Target dari sub aktivitas telah tercapai dengan adanya 20 kelompok pelaksana RHL di lahan gambut	
	1.1.2.3. Pelaksanaan Rehabilitasi lahan Gambut	50.000 batang tertanam di 500 hektar tertanam	Belum terlaksana	0%
	Sub kegiatan ini belum dilaksanakan, mengingat tahap proses penanaman baru sampai pada kesiapan kelompok untuk memulai proses penanaman.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	1.1.2.5. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Gambut	2 kali Bimtek 20 kali perjadin	On Going	5%
	Sub kegiatan ini dilaksanakan bersamaan/digabung dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan RHL mineral, melalui kegiatan bimbingan teknis penanaman.		Sampai dengan pelaporan ini, untuk capaian kegiatan telah dilakukan 1 kali bimtek RHL gambut yang dilakukan	



	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan RHL Swakelola pada 22 - 23 Desember 2025 di Kota Palangka Raya, yang mengintegrasikan pembinaan untuk lahan gambut dan lahan mineral dengan total peserta sebanyak 143 orang (122 laki-laki dan 21 perempuan) dari 40 kelompok Perhutanan Sosial. Dalam sesi khusus lahan gambut, para peserta menerima pendalaman teknis dari Bidang Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup metode pembersihan jalur tanam, teknik pembuatan lubang, tata cara penanaman, hingga prosedur pemeliharaan vegetasi yang spesifik untuk karakteristik ekosistem gambut.		bersamaan dengan pembinaan RHL mineral.
	<i>[Foto. Bimbingan teknis pelaksanaan RHL swakelola pada lahan mineral dan lahan gambut program RBP REDD+ GCF output 2 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2025]</i>		
1.2. Terkelola dan terjaganya areal yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi	1.2.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten Fasilitasi Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tingkat Provinsi/Kabupaten bertujuan untuk menyediakan data dasar mengenai jenis spesies, kelimpahan, lokasi, serta potensi ekonomi keanekaragaman hayati sebagai landasan kebijakan pelestarian di Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini	Tersusunnya 15 Profil Keanekaragaman Hayati tingkat provinsi dan Kabupaten	Tercapai 100% Sampai dengan pelaporan ini, penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati (Kehati) telah mencapai target, dengan adanya 2 dokumen (Kab. Barito Selatan dan Gunung Mas) yang



	dimulai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah pada akhir Juni 2025 dengan fokus awal pada dua wilayah prioritas, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Gunung Mas. Pada awal Q3 2025, tepatnya tanggal 1 dan 2 Juli 2025, telah dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) di Palangka Raya untuk menyamakan persepsi terkait tahapan penyusunan dan identifikasi kebutuhan informasi. Pertemuan ini melibatkan 25 peserta yang dipandu oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah bersama akademisi dari Universitas Palangka Raya, serta dihadiri oleh perwakilan BAPPERIDA, BKSDA Kalteng, dan dinas teknis terkait dari kedua kabupaten tersebut. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data lapangan oleh tenaga ahli untuk menyusun draf dokumen profil Kehati. Memasuki Q4 2025, kegiatan mencapai tahap finalisasi dan validasi dokumen melalui rangkaian FGD akhir. FGD untuk Kabupaten Barito Selatan diselenggarakan pada 10 Desember 2025 di Kantor Dinas PUPR Buntok, sedangkan untuk Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan pada 12 Desember 2025 di Palangka Raya. Validasi ini melibatkan multipihak (66 laki-laki dan 30 perempuan), termasuk unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, BPS, KPH setempat, serta mitra pembangunan seperti WWF Kalimantan, Borneo Nature Foundation (BNF), dan BOS Foundation. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten ini telah dilakukan dengan penyusunan 2 dokumen (Kab. Barito Selatan dan Gunung Mas) yang disusun secara penuh, dan 13 dokumen (Barito Utara, Kapuas, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Barat, Kota Palangkaraya, Barito Timur, Pulang Pisau, Sukamara, Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah) akan dilakukan proses peninjauan (review). Proses review ini mengacu pada Impres No. 1 tahun 2023 tentang pengarus utamaan Keanekaragam Hayati, dan UU kehati No. 32 tahun 2024.		disusun secara penuh, dan 13 dokumen akan dilakukan proses peninjauan (review).
--	---	--	--



[Foto. Forum group discussion penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati tanggal 2 Juli 2025]

1.2.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan KEHATI tingkat Provinsi/Kabupaten	Tersusunnya 15 Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat provinsi dan Kabupaten	On Going	50%
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tingkat Provinsi/Kabupaten bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai pedoman pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Implementasi kegiatan ini mulai berjalan intensif pada Q3 2025, dimulai dengan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten Barito Selatan. Rangkaian kegiatan di Q4 2025 dimulai dengan pertemuan persiapan pada 7 Juli 2025 yang melibatkan 21 peserta untuk menyusun kerangka dokumen dan identifikasi potensi gambut. Proses ini dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Bimtek pada 3 September 2025 di hadapan 41 perwakilan instansi terkait untuk menyusun draf SK Bupati terkait RPPEG periode 2025 - 2055, serta rapat penjaringan isu		Sampai dengan pelaporan ini, proses penyusunan rencana pengelolaan Kehati tingkat kabupaten telah dimulai melalui proses FGD akhir. Dimana 4 Kab yang telah memiliki dokumen RIP (Kab. Seruyan, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur), 4 dokumen RIP masih dalam proses penyusunan (Kobar, Lamandau, Murung Raya, Palangkaraya), dan 7 dokumen RIP Kab dan tingkat provinsi akan dilakukan proses review.	



	strategis pada 10 September 2025 di Palangka Raya (melibatkan 15 partisipan). Memasuki Q4 2025, aktivitas difokuskan pada tahap finalisasi dan validasi data. Pada 14 dan 21 Oktober 2025, dilaksanakan rapat koordinasi untuk verifikasi data spasial serta pembahasan substansi Bab I hingga Bab IV bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. Tahap krusial berlanjut pada 9 - 10 November 2025 melalui Forum Group Discussion (FGD) penyempurnaan rancangan di Buntok yang melibatkan 40 peserta dari unsur pemerintah, tenaga ahli, dan mitra pembangunan. Dokumen RPPEG tersebut kemudian difinalisasi melalui workshop lokakarya pada 24 - 25 November 2025 di Palangka Raya yang menghasilkan draf utuh (Bab I–VI). Sebagai puncaknya, dilaksanakan Konsultasi Publik pada 3 Desember 2025 di Buntok yang dihadiri 98 peserta guna menghimpun masukan akhir sebelum diajukan proses validasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pada Q4 2025, dimulai penyusunan rencana pengelolaan kehati ditingkat kabupaten/kota yang ditandai dengan FGD tahap akhir di Palangka Raya untuk memvalidasi dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati bagi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Murung Raya, dan Kota Palangka Raya, pada 11 - 12 November 2025. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini berhasil memfasilitasi integrasi data teknis dan kebijakan daerah, di mana koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan akurasi informasi untuk perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Untuk target dokumen rencana pengelolaan ini (dokumen RIP) sebanyak 15 dokumen mengalami penyesuaian, Dimana terdapat 4 Kab yang telah memiliki dokumen RIP (Kab. Seruyan, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur), 4 dokumen RIP masih dalam proses penyusunan (Kobar, Lamandau, Murung Raya, Palangkaraya), dan 7 dokumen RIP Kab dan tingkat provinsi akan dilakukan proses review.		
--	---	--	--



[Foto. Sosialisasi penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPFG) Kabupaten Barito Selatan tanggal 3 September 2025]

	1.2.3. Monitoring dan pemantauan KEHATI	Berjalannya 6 kali pemantauan dan monitoring pada areal yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi	Belum terlaksana	0%
	Kegiatan monitoring dan pemantauan KEHATI didukung dengan dua sub kegiatan, meliputi pemantauan lapangan (1.2.3.1) dan pelaporan hasil pemantauan (1.2.3.2).		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	1.2.3.1. Pemantauan dan Monitoring lapangan	6 kali monitoring	Belum terlaksana	0%
	Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target 1 kali pemantauan, namun belum terlaksana.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	1.2.3.2. Penyusunan laporan pemantauan dan monitoring	6 laporan monitoring	Belum terlaksana	0%
	Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024-2025 dengan target 1 kali penyusunan laporan Kehati, namun belum terlaksana.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
2.1. Menurunnya tingkat gangguan dan kebakaran hutan dan lahan	2.1.1. Perlindungan dan pengamanan Hutan	a. Terlaksananya minimal 36 kali patroli pengamanan hutan	On Going	30%
	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan didukung dengan dua sub kegiatan, meliputi patroli/pengamanan hutan termasuk pengadaan sarana dan prasarana (papan		Sampai dengan pelaporan ini capaian kegiatan berupa 13 kali patroli dan pengadaan 100 papan himbauan	



	himbauan dll) (2.1.1.1.) dan penyusunan laporan perlindungan dan pengamanan hutan (2.1.1.2). Berikut informasi capaian kegiatan dari kegiatan 2.1.1:	perlindungan dan pengamanan hutan termasuk papan peringatan c. Tersedianya 36 laporan	pengamanan kawasan, dan 150 set seragam taktis dan perlengkapan lapangan untuk personel Dinas Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api (MPA).	
	2.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan Prasarana (papan himbauan dll)	36 kali patroli dan 3 paket pengadaan (pakaian patroli dan papan informasi)	On Going	35%
	Kegiatan patroli dan pengamanan hutan yang mencakup pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara intensif sejak akhir tahun 2024 hingga Q4 tahun 2025 untuk mencegah tindak pidana kehutanan seperti penebangan liar, perambahan, dan perburuan, serta memperkuat infrastruktur pengamanan di tingkat tapak. Patroli ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama UPTD. Rangkaian kegiatan dimulai pada Q4 2024 dengan pelaksanaan tiga kali patroli oleh 30 personel di wilayah KPHP Kahayan Hilir (21 - 22 Desember), KPHP Katingan Hilir (23 - 24 Desember), dan KPHP Katingan Hulu (28 - 29 Desember). Memasuki Q1 2025, tim gabungan kembali melaksanakan dua kali patroli di wilayah kerja UPT KPHP Kahayan Hulu (14 - 17 Februari), UPT KPHL Kapuas Kahayan (24 - 27 Februari), dan KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah (24 - 27 Maret) untuk mengecek lokasi eks-kebakaran dan pertambangan rakyat, serta memulai proses pengadaan 50 unit plang informasi. Pada Q2 2025, patroli difokuskan di wilayah KPHL Gerbang Barito (30 April - 3 Mei) dan KPHP Barito Hilir (21 - 24 Mei) untuk memantau kerawanan kebakaran serta aktivitas ilegal lainnya. Selain pelaksanaan dua kali patroli, tim berhasil memasang 50 plang informasi dari kuartal sebelumnya dan melanjutkan pengadaan 50 plang tambahan guna mencapai target total 100 unit. Selanjutnya, pada Q3 2025, patroli dilaksanakan di wilayah KPHP Kahayan Tengah (1 - 4 Juli) dan KPHP Seruyan Hulu (7 - 11 Agustus) yang mencakup kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Pada periode ini, dilakukan pengadaan 50 unit papan himbauan baru untuk KPH Katingan Hilir dan Gerbang Barito, serta 50 paket pakaian patroli (celana, topi, baju untuk Dinas Kehutanan). Rangkaian kegiatan tahun 2025 ditutup pada triwulan IV dengan pelaksanaan tiga kali patroli di KPHP Kotawaringin Barat (10 - 14 Oktober),		Sampai dengan pelaporan ini capaian kegiatan berupa 13 kali patroli dan pengadaan 100 papan informasi himbauan pengamanan Kawasan, dan 50 set seragam patroli Dinas Kehutanan.	



	KPHP Murung Raya (21 - 25 November), dan KPHP Sukamara Lamandau (27 - 30 Desember). Patroli ini berhasil mengidentifikasi adanya kebakaran lahan seluas 15 hektar di Desa Teluk Bogam serta memetakan tantangan tenurial masyarakat di dalam kawasan hutan.			
	2.1.1.2. Penyusunan laporan perlindungan dan pengamanan hutan	36 laporan	On Going	10%
	Kegiatan Penyusunan Laporan Perlindungan dan Pengamanan Hutan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pasca-pelaksanaan patroli pengamanan kawasan guna merangkum hasil temuan lapangan menjadi dokumen acuan teknis dalam menangani permasalahan di lokasi tapak. Rangkaian penyusunan laporan ini dilaksanakan secara pada akhir Q4 tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27, 30, dan 31 Desember 2024, dengan melibatkan tim gabungan dari unsur Dinas Kehutanan, unit KPH, serta dari Yayasan Penabulu. Secara detail, pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam tiga tahapan pertemuan: • 27 Desember 2024: Diikuti oleh 15 orang (11 Dinas Kehutanan, 1 KPH, dan 3 Penabulu). • 30 Desember 2024: Diikuti oleh 15 orang (10 Dinas Kehutanan, 2 KPH, dan 3 Penabulu). • 31 Desember 2024: Diikuti oleh 15 orang (10 Dinas Kehutanan, 1 KPH, dan 4 Penabulu). Hasil dari rangkaian aktivitas ini adalah terangkumnya data temuan patroli secara sistematis yang mencakup identifikasi gangguan hutan serta rekomendasi tindak lanjut bagi pengelola Kawasan. Namun dalam perjalannya kebutuhan pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan penyesuaian/revisi pelaksanaannya, untuk penyusunan dokumen laporan hasil patroli akan dilakukan 2/3 kali dalam setahun, dan akan melakukan penyepakatan format laporan sebagai dasar pengukuran hasil.		Sampai dengan pelaporan ini capaian kegiatan berupa 3 kali pertemuan untuk pembahasan hasil patroli dan menyusunnya ke dalam laporan hasil patroli yang berkelanjutan. Sebagai catatan sub kegiatan ini akan dilakukan evaluasi dari target kegiatan.	



[Foto. Patroli dan pengamanan hutan tanggal 1 Mei 2025]

2.1.2. Pengendalian dan pencegahan Kebakaran hutan dan lahan	a. Terbentuk/menguatnya 20 kelompok Masyarakat peduli Api	On Going	30%
Kegiatan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan didukung dengan beberapa sub kegiatan, meliputi: Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api (2.1.2.1), Pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan (2.1.2.2), Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Karhutla termasuk papan peringatan (2.1.2.3) dan Patroli pada areal-areal rawan kebakaran hutan dan lahan (2.1.2.4).	b. Terlaksananya 20 kali pelatihan di 20 MPA	Sampai dengan pelaporan ini capaian kegiatan berupa 8 kali pengutaan dan pelatihan di 8 desa/MPA, penyediaan 100 plang informasi, 20 unit pompa, 100 psc personal use untuk KMPA, 2 unit drone, dan 8 kali patrol karhutla.	
Jika mengacu pada rencana kerja proposal yang diusulkan, keempat sub kegiatan tersebut masuk kedalam rencana kerja tahun 2025, dan satu sub kegiatan yang berlanjut ke tahun 2026 yaitu kegiatan patroli kebakaran hutan. Berikut capaian dari masing-masing sub kegiatan tersebut:	c. Tersediannya 1 paket sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan karhutla		
	d. Terlaksananya minimal 24 kali patroli pada areal-areal rawan karhutla		
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api	20 MPA	On Going	40%
Kegiatan fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di		Sampai dengan pelaporan ini telah	dilakukan



	Kalimantan Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara mandiri. Pada awal tahun 2025 (Q1 dan Q4), aktivitas ini difokuskan pada tahap koordinasi intensif dengan Manggala Agni dan BPBD guna menyelaraskan rencana kerja dan menghindari tumpang tindih lokasi pembentukan MPA di lapangan. Memasuki Q3 2025, implementasi mulai dilakukan di wilayah kerja KPHL Kapuas Kahayan, Kabupaten Kapuas, yang mencakup enam desa strategis. Rangkaian penguatan tersebut dilaksanakan di Desa Tambak Bajai (26 - 28 Agustus 2025), Desa Tarusan Raya (31 Agustus - 2 September 2025), Desa Petak Puti (5 - 7 September 2025), Desa Mantangai Hulu (10 - 12 September 2025), Desa Katimpun (15 - 17 September 2025), dan Desa Katunjung (20 - 22 September 2025). Pada Q4 2025, cakupan wilayah diperluas ke wilayah kerja KPHP Katingan Hilir Unit XXX di Kabupaten Katingan untuk memperkuat kesiapsiagaan di daerah rawan emisi lainnya. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tumbang Runen pada 29 - 30 September 2025 serta di Desa Tampelas pada 4 - 5 Oktober 2025. Dalam setiap sesi, anggota MPA dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai peran dan fungsi kelompok, serta informasi teknis terkini terkait pencegahan dan penanganan karhutla yang dinarasumberi oleh tenaga ahli dari Dinas Kehutanan dan Manggala Agni. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini telah berhasil membentuk dan memperkuat 8 kelompok MPA dari total target 20 kelompok, dengan total partisipan sebanyak 217 laki-laki dan 11 perempuan. Selama proses penguatan yang telah dilakukan, kegiatan ini berfungsi sebagai penyegaran kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA), mengingat kelompok yang diintervensi telah terbentuk sebelumnya. Penguatan ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mitigasi, karena MPA pada umumnya aktif bekerja secara intensif pada periode tertentu, khususnya saat terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kegiatan penguatan ini menjadi momentum penting untuk merevitalisasi peran, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kembali kapasitas kelembagaan kelompok.		penguatan/pembentukan MPA di 8 desa/MPA. Sehingga masih menyisakan 12 desa/MPA yang harus diintervensi pada tahun berikutnya.
--	--	--	--



	2.1.2.2. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan	20 kali pelatihan (setidaknya 200 orang terlatih)	On Going	40%
	Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan secara intensif pada Q3 dan Q4 tahun 2025 guna membekali kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan pengetahuan teknis dan keterampilan lapangan dalam menghadapi ancaman karhutla. Rangkaian kegiatan dimulai pada Q3 2025 yang difokuskan pada enam desa binaan KPHL Kapuas Kahayan di Kabupaten Kapuas, yaitu: 1. Desa Tambak Bajai (26 - 28 Agustus 2025). 2. Desa Tarusan Raya (31 Agustus - 2 September 2025). 3. Desa Petak Puti (5 - 7 September 2025). 4. Desa Mantangai Hulu (10 - 12 September 2025). 5. Desa Katimpun (15 - 17 September 2025). 6. Desa Katunjung (20 - 22 September 2025). Pelatihan pada periode ini melibatkan 168 partisipan (161 laki-laki dan 7 perempuan) yang mendapatkan pembekalan mengenai cara menjaga kebugaran fisik serta praktik langsung penggunaan alat pemadam api. Pada Q4 2025, kegiatan berlanjut di wilayah kerja KPHP Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang meliputi Desa Tumbang Runen (1 - 3 Oktober 2025) dan Desa Tampelas (6 - 8 Oktober 2025). Dalam tahap ini, sebanyak 60 partisipan (56 laki-laki dan 4 perempuan) dilatih langsung oleh tenaga ahli dari Manggala Agni (DAOPS Kalimantan I/Palangka Raya) mengenai metode pencegahan, pengenalan jenis-jenis peralatan pemadam, hingga teknik simulasi pemadaman di lapangan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini telah berhasil memberikan pelatihan teknis kepada 8 kelompok MPA dari total target 20 kelompok, dengan total partisipan sama dengan pembentukan/pengautan MPA sebanyak 217 laki-laki dan 11 perempuan. Tidak jauh berbeda dengan kegiatan penguatan, pelatihan MPA ini memiliki tambahan fokus pada aspek teknis operasional. Efektivitas kinerja MPA sangat dipengaruhi oleh keterampilan anggota dalam menggunakan peralatan serta pemahaman terhadap karakteristik medan, sebagaimana telah		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan pelatihan di 8 desa/MPA dengan 228 partisipan terlibat. Sehingga masih menyisakan 12 pelatihan pada tahun berikutnya.	



	dijelaskan dan dipraktikkan selama pelatihan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis menjadi faktor kunci dalam mendukung optimalisasi peran MPA di lapangan.		
	2.1.2.3. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Karhutla termasuk papan peringatan	1 paket pengadaan (20 Unit menara pantau, 100 unit papan pengumuman, 20 unit pompa, 1 drone, 100 personal use MPA)	On Going50%
	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dilaksanakan secara sepanjang tahun 2025 guna memperkuat kapasitas teknis penanggulangan kebakaran di wilayah rawan, khususnya di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotawaringin Timur. Rangkaian kegiatan dimulai pada Q1 dengan inisiasi pengadaan 100 unit papan informasi peringatan dini yang memuat materi edukasi pencegahan Karhutla. Memasuki Q2, seluruh plang tersebut telah berhasil diselesaikan dan dipasang pada titik-titik strategis di lapangan, dibarengi dengan pengadaan 2 unit drone untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kawasan melalui deteksi udara. Pada Q3, dukungan prasarana difokuskan pada pemenuhan alat pemadam melalui pengadaan 20 unit pompa air portable dan 100 pcs personal use yang telah didistribusikan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa sasaran pasca-pelatihan teknis. Sementara itu, terkait pengadaan menara pantau, pihak pelaksana masih melakukan koordinasi dan revisi usulan berdasarkan arahan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi.		Sampai dengan laporan ini telah dilakukan pengadaan 100 plang karhutla dan 20 unit pompa, 100 pcs personal use KMPA, 2 unit drone. Untuk target kegiatan lainnya akan dilakukan penyesuaian mengingat kebutuhan ditingkat tapak.
	2.1.2.4. Patroli pada areal-areal rawan kebakaran hutan dan lahan	24 kali patroli	On Going17%
	Kegiatan patroli pada areal-areal rawan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan secara intensif pada Q3 tahun 2025 dengan tujuan utama untuk melakukan deteksi dini terhadap titik panas (hotspot) serta indikasi aktivitas pembakaran di wilayah rawan kebakaran lahan (Karla). Rangkaian patroli ini difokuskan di wilayah Kota Palangka Raya dan diselenggarakan melalui kolaborasi terpadu antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Kelurahan, serta dukungan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Sepanjang Q3 2025, telah dilaksanakan delapan agenda patroli gabungan dengan rincian sebagai berikut:		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan patrol karhutla sebanyak 8 kali.



	1. 19–23 Agustus 2025: Patroli di Kelurahan Langkai dan Kelurahan Petuk Katimpun yang melibatkan 11 personel (9 laki-laki dan 2 perempuan). 2. 25–29 Agustus 2025: Patroli di Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Menteng dengan keterlibatan 11 personel (9 laki-laki dan 2 perempuan). 3. 1–5 September 2025: Patroli di Kelurahan Bereng Bengkel dan Kelurahan Sabaru yang diikuti oleh 11 personel (9 laki-laki dan 2 perempuan). 4. 8–12 September 2025: Patroli di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Kalampangan dengan melibatkan 11 personel (7 laki-laki dan 4 perempuan). 5. 29 September – 3 Oktober 2025: Patroli di Kelurahan Banturung dan Kelurahan Habaring Hurung dengan melibatkan 11 personel (9 laki-laki dan 2 perempuan). 6. 22 – 26 September 2025: Patroli di Kelurahan Kameloh Baru dan Kelurahan Tanjung Pinang dengan melibatkan 11 personel (7 laki-laki dan 4 perempuan). 7. 29 September – 3 Oktober 2025: Patroli di Kelurahan Marang dan Kelurahan Tumbang Tahai dengan melibatkan 11 personel (8 laki-laki dan 3 perempuan). 8. 22 – 26 September 2025: Patroli di Kelurahan Tumbang Rungan dan Kelurahan Panarung dengan melibatkan 11 personel (9 laki-laki dan 2 perempuan). Hasil dari rangkaian kegiatan ini adalah terlaksananya 8 kali patroli gabungan, yang melampaui target triwulanan awal sebanyak 3 kali patroli. Selain melakukan pengawasan fisik di lapangan, tim berhasil melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran lahan serta inventarisasi personel TSAK di masing-masing kelurahan guna memperkuat sistem respon cepat di tingkat tapak. Capaian ini secara strategis mendukung target proyek untuk menurunkan tingkat gangguan karhutla di daerah rawan emisi tinggi. Proses patroli kebakaran hutan dan kebakaran lahan yang telah dilaksanakan melibatkan berbagai pihak. Pembagian kewenangan penanganan kebakaran, baik di kawasan hutan maupun di lahan non-kawasan hutan, berbeda pada setiap tingkat pemerintahan. Oleh karena		
--	--	--	--



	itu, koordinasi yang efektif dan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan respons yang cepat, tepat, dan terintegrasi.			
	17 September 2025 2°24'46,692\"S 114°26'4,428\"E Kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Katimpun [Foto. Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Katimpun tanggal 17 September 2025]			
2.2. Menguatnya kapasitas pengelola hutan di tingkat tapak (KPH/TAHURA)	2.2.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA	Tersusunnya 27 Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJP/RPHJPD/RP) KPH dan TAHURA	On Going	4%
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA dilaksanakan secara intensif mulai Q4 tahun 2024 hingga Q4 tahun 2025 guna memperkuat tata kelola hutan di tingkat tapak melalui penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sesuai standar nasional. Sebelumnya, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPH dan Tahura selama beberapa tahun pelaksanaan belum menunjukkan progres yang optimal, mengingat luasnya target intervensi yang direncanakan. Pada tahun ini, pendanaan RBP difokuskan untuk mendukung penyusunan rencana pengelolaan Tahura, mengingat Provinsi Kalimantan Tengah baru mendapatkan pelimpahan mandat pengelolaan tahura IMSB		Sampai dengan pelaporan ini, telah disusun 1 draft RPJP TAHURA IMSB periode 2026–2035, dengan catatan masih dalam proses pengesahan dokumen blok yang sudah melalui konsultasi publik yang telah disahkan pada Januari 2026.	



	(sebelumnya Kawasan Suaka Alam/KSA) pada tahun 2023. Rangkaian kegiatan dimulai pada 7 - 9 Desember 2024 dengan pelaksanaan survei potensi kawasan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah (IMSB) seluas 58.113 ha guna mengumpulkan data primer flora dan fauna sebagai bahan awal rencana pengelolaan. Memasuki Q1 tahun 2025, koordinasi dilanjutkan melalui rapat diskusi pada 21 Januari 2025 mengenai penyesuaian kewenangan KPH, rapat koordinasi Tim Pergub TAHURA pada 11 Februari 2025, serta Bimbingan Teknis Revisi RPHJP pada 19 - 20 Februari 2025 yang melibatkan 70 partisipan untuk mensinkronkan pedoman pengelolaan sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Pada Q2 2025, kegiatan lanjutan dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama IPSDH-KLH untuk kebutuhan data teknis dan data spasial guna menunjang penyusunan RPHJP KPH dan RPJP Tahura pada 7 - 10 Mei 2025, serta konsultasi penyusunan rencana blok pengelolaan TAHURA IMSB di Jakarta/Bogor pada 24 - 27 Juni 2025. Tahapan ini diperkuat pada Q3 2025 melalui orientasi lapangan di wilayah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau pada 29 Juli - 2 Agustus 2025 untuk mempertajam kajian otentik kawasan yang mendukung rancangan blok pengelolaan Tahura. Puncak rangkaian kegiatan terjadi pada Q4 tahun 2025 dengan fokus utama pada finalisasi arsitektur pengelolaan TAHURA IMSB. Rangkaian ini mencakup pertemuan para pihak pasca-penetapan kawasan pada 9 Oktober 2025, serta enam seri rapat tim kerja intensif sepanjang Oktober hingga Desember 2025 yang melibatkan akademisi dan mitra pembangunan. Tim juga melakukan dua kali konsultasi teknis ke Direktorat Perencanaan Konservasi KLHK (12 - 15 November dan 4 - 6 Desember 2025) guna mematangkan draf blok pengelolaan. Seluruh proses ini ditutup dengan dua agenda, yaitu Konsultasi Publik Rancangan Blok Pengelolaan pada 19 November 2025 (78 orang partisipan) dan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) pada 30 Desember 2025 (98 orang partisipan). Hasil signifikan dari rangkaian ini adalah tersusunnya draf final RPJP TAHURA IMSB periode 2026 - 2035 dengan penyesuaian luasan kawasan menjadi 58.009,97 ha, yang menjadi landasan legal dan teknis bagi		
--	---	--	--



	perlindungan ekosistem gambut serta pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Tengah. Selama periode Q4 2024 hingga Q4 2025, terdapat 517 orang (391 laki-laki dan 126 perempuan) yang berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH dan TAHURA. Pelibatan ini mencakup peran sebagai peserta, narasumber, serta bentuk kontribusi lainnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Selama proses penyusunan ini, perencanaan di tingkat tapak sangat bergantung pada ketersediaan data yang mutakhir dan akurat. Keterbatasan data yang benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan turut memengaruhi arah dan ketepatan perencanaan. Data pada tingkat provinsi saat ini belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika terbaru, seperti perubahan perizinan, perubahan status kawasan, alih fungsi lahan, dan perkembangan lainnya. Sementara itu, penggunaan data tetap harus mengacu pada data nasional, sehingga diperlukan proses verifikasi dan sinkronisasi agar perencanaan tata hutan yang disusun tetap relevan dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.		
--	--	--	--



[Foto. Orientasi lapangan tim kerja penyusunan rancangan blok pengelolaan Taman Hutan Raya Isen Mulang Sebangau Berkah Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 29 Juli – 2 Agustus 2025]

Activity 2.2.2. Peningkatan kapasitas SDM KPH dan TAHURA dalam Pengelolaan Hutan lestari	4 kali pelatihan (setidaknya 200 Personil KPH dan Tahura mengikuti pelatihan terkait pengelolaan hutan lestari)	Belum terlaksana	0%
Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target 4 kali pelatihan untuk KPH, namun belum dilakukan karena fokus utama masih pada perbaikan dokumen tata hutan		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
2.2.3. Dukungan sarana prasarana operasional KPH dan TAHURA	Tersedianya sarana dan prasarana operasional KPH (1 paket, motor, GPS, HT, personal use)	On Going	30%
Kegiatan dukungan sarana dan prasarana operasional KPH dan TAHURA dilaksanakan Q4 tahun 2025 dengan tujuan utama memperkuat kapasitas teknis dalam pengelolaan, perlindungan, serta pelayanan lingkungan di tingkat tapak agar lebih efektif dan efisien. Fokus utama realisasi pada periode ini adalah pengadaan perangkat elektronik yang terdiri dari 50 unit GPS dan 50 unit handy talky (HT). Seluruh peralatan tersebut telah berhasil didistribusikan kepada unit-unit KPH dan TAHURA di seluruh wilayah Kalimantan Tengah melalui koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi.		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan pengadaan 50 unit GPS dan 50 unit HT untuk KPH/Tahura.	



	Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan infrastruktur operasional pengelola hutan di lapangan, yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas pemantauan Kawasan.						
	 [Foto. Pengadaan GPS dan contoh penggunaannya di lapangan]						
3.1. Meningkatnya peluang usaha dan Kewirausahaan masyarakat Pemegang izin PS	3.1.1. Identifikasi/Studi potensi dan peluang usaha ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target 1 dokumen kajian potensi dan peluang usaha ekonomi masyarakat. Namun kegiatan ini belum dilakukan.	Tersediannya 1 dokumen kajian potensi dan peluang usaha ekonomi masyarakat dalam dokumen kajian	<table><tr><td>On Going</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="2">Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.</td></tr></table>	On Going	0%	Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
On Going	0%						
Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.							



3.2. Bertambahnya luas areal yang di kelola oleh masyarakat secara lestari	3.2.1. Fasilitas penguatan kelembagaan pemegang izin PS	Tersedianya 10 Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS)	Belum terlaksana	0%
	Kegiatan fasilitas penguatan kelembagaan pemegang izin PS didalam proposal yang diusulkan mejadi salah satu kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2025. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini belum dapat dilakukan. Kegiatan ini didukung oleh Fasilitas penguatan administrasi kelembagaan pemegang izin PS (3.2.1.1) dan Fasilitas Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) (3.2.1.2)		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	3.2.1.1. Fasilitas penguatan administrasi kelembagaan pemegang izin PS	10 kelompok PS	Belum terlaksana	0%
	Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target 10 kelompok PS, namun belum dilakukan.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	3.2.1.2. Fasilitas Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS)	10 Dokumen RKPS	Belum terlaksana	0%
	Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target 10 dokumen RKPS, namun belum dilakukan.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
4.1. Menguatnya kapasitas kelembagaan pengelola/pelaksana REDD+ Prov Kalteng	4.1.1. Penguatan lembaga pengelola/pelaksana REDD+ (Pokja REDD+)	a. Tersedianya 1 dokumen rencana kerja	On Going	20%
	Kegiatan penguatan lembaga pengelola/pelaksana REDD+ (Pokja REDD+) ini didukung oleh dua sub aktivitas, meliputi: FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalteng (4.1.1.1) dan Dukungan sarana dan prasarana operasional pokja REDD+ (4.1.1.2). Kedua sub kegiatan ini masuk kedalam rencana kerja tahun 2025. Berikut capaian kegiatan penguatan kelembagaan yang telah dilakukan.	b. Tersedianya 1 paket dukungan oprasional kelembagaan termasuk kewenangan legal administratif dari Pokja REDD+ untuk melaksanakan kegiatan. c. 1 paket Jasa pembangunan website REDD+ Sub Nasinal Kalteng	Sampai dengan pelaporan ini, baru dilakukan 8 kali pertemuan untuk pembahasan penguatan kelembagaan pokja, pengadaan alat elektronik, dukungan tenaga ahli dan administrasi, serta persiapan renovasi kantor Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	
	4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalteng	1 rencana kerja	On Going	10%
	Kegiatan FGD Mekanisme Kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalimantan Tengah telah dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025 untuk memperkuat struktur kelembagaan, merumuskan rencana kerja, dan menyelaraskan mekanisme operasional Sekretariat Pokja REDD+ Kalteng. Kegiatan ini lakukan oleh Pokja REDD + Kalimantan Tengah yang teranggotakan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 8 kali pertemuan untuk pembahasan kelembagaan Pokja REDD+ Kalimanta Tengah, dan untuk dokumen rencana kerja Pokja masih dalam proses.	



	Perkebunan, Perwakilan Akademisi dan Mitra Pembangunan. Rangkaian kegiatan dimulai pada Q1 2025, tepatnya tanggal 4 dan 10 Februari 2025, dengan fokus pembahasan revisi Surat Keputusan (SK) Pokja REDD+ Kalteng, yang dilanjutkan pada 6 dan 22 Maret 2025 untuk menyusun format SK dan personalia sekretariat. Pertemuan yang melibatkan 60 partisipan (46 laki-laki dan 14 perempuan) ini berhasil menyepakati pembagian bidang dalam sekretariat baru, mencakup Bidang Perencanaan dan Anggaran; Pemantauan, Pengukuran, dan Pelaporan; Mobilisasi Dana dan Pembagian Manfaat; Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan; serta Komunikasi, Publikasi, dan Pengelolaan Pengetahuan. Pada Q2 2025, intensitas kegiatan berlanjut melalui serangkaian rapat teknis untuk pendalaman program dan anggaran di masing-masing bidang. Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 (Bidang Komunikasi), 28 April 2025 (Bidang Mobilisasi Dana), dan 29 April 2025 (Bidang MRV dan Pelaporan), serta rapat persiapan keikutsertaan Kalteng Expo 2025 pada 15 Mei 2025, yang melibatkan 63 partisipan (48 laki-laki dan 15 perempuan). Memasuki Q3 2025, tepatnya pada 12 September 2025, Bidang Komunikasi mengadakan rapat terbatas di Hotel Fovere Palangka Raya yang menghasilkan strategi percepatan penyebaran informasi REDD+ bagi ASN di lingkup pemerintah provinsi serta komitmen integrasi prinsip safeguard dalam setiap aktivitas publik, yang melibatkan 7 laki-laki dan 3 perempuan. Rangkaian penguatan kelembagaan ini ditutup pada Q4 melalui rapat koordinasi besar yang diselenggarakan pada 13 - 15 November 2025 di Palangka Raya dengan melibatkan 61 peserta (45 laki-laki dan 16 perempuan) dari berbagai OPD teknis, akademisi, dan mitra pembangunan. Hasil strategis dari pertemuan ini adalah disepakatinya konsep "Rumah Besar REDD+ Kalimantan Tengah" sebagai kerangka integrasi peran pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat dalam pengurangan emisi. Selain itu, pertemuan ini berhasil mengidentifikasi hambatan administratif, menetapkan penunjukan narahubung tambahan untuk memperlancar komunikasi antar-OPD, serta merumuskan rencana penyusunan Anggaran Biaya (RAB) jangka panjang (1, 3, dan 6 tahun) yang akan		
--	--	--	--



	difinalisasi. Secara keseluruhan, rangkaian FGD ini telah berhasil mentransformasi Pokja REDD+ Kalteng menjadi lembaga koordinatif yang lebih solid, transparan, dan akuntabel dalam mengelola agenda penurunan emisi daerah.		
	4.1.1.2. Dukungan sarana dan prasarana operasional pokja REDD+	2 paket dukungan operasional kelembagaan POKJA REDD+ (laptop, printer, sewa sekretariat, PC, sewa fotocopy, website, tenaga ahli REDD+, tenaga admin)	On Going 30%
	Kegiatan dukungan sarana dan prasarana operasional Pokja REDD+ dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2025 dengan tujuan untuk menunjang kelancaran koordinasi, perencanaan, serta peningkatan efektivitas kerja sekretariat di lapangan. Rangkaian kegiatan utama dimulai pada Q2 2025, di mana pada tanggal 21 - 22 Mei 2025 dilakukan survei perencanaan untuk renovasi kantor sekretariat Pokja REDD+ Kalimantan Tengah. Secara paralel, dilakukan pengadaan perangkat elektronik yang terdiri dari 6 unit laptop, 1 unit komputer, dan 2 unit printer, serta pengadaan tenaga ahli berupa konsultan REDD+ dan konsultan administrasi guna memperkuat tata kelola kelembagaan. Pada Q4 2025, aktivitas difokuskan pada pemenuhan fasilitas fisik melalui rehabilitasi kantor sekretariat Pokja REDD+. Hasil signifikan dari periode ini adalah tersusunnya satu desain renovasi bangunan yang telah disepakati sebagai acuan teknis pelaksanaan rehabilitasi kantor agar lebih representatif. Selain itu, dukungan operasional terus berjalan melalui pendampingan berkelanjutan dari konsultan dan staf administrasi yang telah ditunjuk. Rangkaian dukungan ini berhasil meningkatkan kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM sekretariat, memastikan seluruh agenda penurunan emisi di Kalimantan Tengah mendapatkan dukungan administratif dan fasilitas yang memadai.		Sampai dengan pelaporan telah dilakukan pengadaan elektronik untuk pokja, penyediaan tenaga ahli dan administrasi, serta persiapan renovasi kantor Pokja REDD+ Kalimantan Tengah



[Foto. Rapat koordinasi kelompok pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 November 2025]

4.1.2. Peningkatan Kapasitas pengelola/pelaksana REDD+	a. Terlaksanannya 1 kali pelatihan (setidaknya 30 orang) meningkat kapasitasnya terkait perencanaan dan implementasi MRV REDD+	Tercapai	100%
Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola/pelaksana REDD+ Kalimantan Tengah didukung oleh dua sub kegiatan meliputi Pelatihan dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementasi REDD+ (4.1.2.1) dan Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan Biocarbon Fund dan Provinsi Kaltim untuk pembelajaran FCPF (4.1.2.2). Kedua kegiatan ini masuk kedalam rencana kerja tahun 2025 yang diusulkan didalam proposal. Berikut progress pencapaian dari kegiatan tersebut.	b. Terlaksanannya 1 kali studi banding (setidaknya 15 orang) meningkat kapasitasnya terkait implementasi RBP Biocarbon Fund/FCPF	Sampai dengan pelaporan ini capaian melebihi target dengan 5 kali kegiatan penguatan kelembagaan pengelola/pelaksana REDD+ dan 2 kali studi banding.	
4.1.2.1. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementasi REDD+	1 kali pelatihan (setidaknya 30 orang)	Tercapai	100%
Kegiatan Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Perencanaan Implementasi REDD+ dilaksanakan dari akhir tahun 2024 hingga Q3 tahun 2025 untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Pokja REDD+ dalam aspek teknis, administratif, dan kebijakan. Rangkaian ini dimulai pada 25 November 2024		Sampai dengan pelaporan ini terdapat 5 kegiatan yang mendukung proses peningkatan kapasitas perencanaan/implementasi REDD+, jika dilihat dari 5 kegiatan yang dilakukan,	



	melalui partisipasi dalam Kick-Off Meeting Program GCF Output 2 di Jambi, yang memberikan wawasan strategis mengenai pemanfaatan dana RBP dan kesiapan Proyek BioCF sebagai referensi perencanaan di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pada 18 - 19 Maret 2025, dilaksanakan Bimtek Penyusunan Rencana Implementasi REDD+ di Palangka Raya yang melibatkan 68 peserta (40 laki-laki dan 28 perempuan) dari unsur pemerintah, akademisi, dan mitra Pembangunan. Forum ini berhasil menyelaraskan pemahaman mengenai arsitektur REDD+, penyusunan rencana aksi (action plan), serta perumusan teori perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah,. Memasuki Q3 tahun 2025, peningkatan kapasitas difokuskan pada instrumen pendukung implementasi melalui tiga agenda utama. Pertama, pada 13 - 17 Juli 2025, perwakilan Pokja mengikuti pelatihan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) oleh GCF TF di Tangerang guna mendalami mekanisme perdagangan karbon dan akses pendanaan iklim. Kedua, pada 19 - 20 Agustus 2025, diselenggarakan pelatihan pengembangan database GIS di Palangka Raya bagi 30 peserta untuk mempraktikkan penggunaan BioCF Toolbox dalam pengelolaan database FRL periode 2011 - 2020. Terakhir, pada 21 - 23 Agustus 2025, tim berpartisipasi dalam Workshop Sinergi Ekosistem Perdagangan Karbon di Bali yang membahas tata kelola pasar karbon, registrasi sistem SRN, serta peluang peningkatan harga karbon melalui manfaat tambahan (<i>co-benefits</i>). Seluruh rangkaian kegiatan ini telah berhasil memperkuat kesiapan teknis dan administratif Pokja REDD+ Kalteng dalam menyusun dokumen rencana aksi yang akuntabel dan selaras dengan standar nasional maupun internasional.		secara tidak langsung, 3 kegiatan menghadiri undangan, dan 2 kegiatan langsung pada peningkatan kapasitas/bimtek berupa 1 bimtek Penyusunan Rencana Implementasi REDD+ Kalimantan Tengah yang melibatkan 68 peserta (40 laki-laki dan 28 perempuan) dan 1 kali pelatihan pengembangan database GIS untuk analisis REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan 30 peserta (24 laki-laki dan 6 perempuan).	
	4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan Biocarbon Fund dan Provinsi Kaltim untuk pembelajaran FCPF	1 kali studi banding (setidaknya 15 orang)	Tercapai	100%
	Kegiatan studi banding Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke provinsi lain dilaksanakan dalam dua tahap utama selama tahun 2025 untuk mendalami tata kelola kelembagaan, mekanisme Result Based Payment (RBP), serta implementasi teknis di lapangan. Tahap pertama dilaksanakan lebih awal dari jadwal semula, yakni pada tanggal 11 - 14 Maret 2025, di mana sebanyak 16 perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukann 2 kali studi banding ke Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat. Penyesuaian lokasi studi banding dilakukan yang awalnya ke Kalimantan Timur dialihkan ke Kalimantan Barat.	



	Kehutanan, dan Bappeda Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam rangkaian ini, peserta (25 laki-laki dan 21 perempuan) melakukan FGD bersama Pokja REDD+ Kalimantan Barat dan Yayasan Bentang, serta melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Kelompok Tani Perhutanan Sosial di wilayah Kubu Raya. Hasil dari kunjungan ini memberikan pembelajaran krusial bahwa kepemimpinan (leadership) dari tingkat Gubernur hingga Bupati merupakan elemen utama yang memperkuat implementasi REDD+ di tingkat daerah. Tahap kedua dilaksanakan pada Q4 2025, tepatnya tanggal 17 - 20 November 2025, dengan fokus pembelajaran pada program Biocarbon Fund (BioCF-ISFL) di Provinsi Jambi. Kegiatan ini melibatkan partisipasi yang lebih luas sebanyak 54 orang (35 laki-laki dan 19 perempuan) dari unsur OPD teknis dan mitra Pembangunan dari Provinsi Kalimantan Tengah (Pokja REDD+ Kalteng) dan perwakilan OPD dari Provinsi Jambi. Selain mendalami manajemen kelembagaan dan sistem MRV bersama Bappeda Jambi dan SNPMU BioCF, tim melakukan kunjungan lapangan ke Tahura Orang Kayo Hitam untuk mempelajari teknik rehabilitasi ekosistem gambut serta ke Kampung Iklim Desa Tangkit Baru yang sukses mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. Secara keseluruhan, rangkaian studi banding ini berhasil mencapai hasil strategis berupa penguatan kapasitas Pokja REDD+ Kalteng dalam merancang skema pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan keberlanjutan program RBP melalui referensi praktik baik dari provinsi pionir lainnya.		
--	--	--	--



[Foto. Studi banding Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Jambi tanggal 17 – 20 November 2025]

4.1.3. Koordinasi dan Konsultasi pada pemangku kepentingan terkait pengelola/pelaksana REDD+	a. Terlaksananya 1 kali konsultasi publik (persamaan persepsi dari Pokja REDD)	On Going	20%
Kegiatan koordinasi dan konsultasi pemangku kepentingan terkait pengelolaan/pelaksanaan REDD+ di dalam proposal yang diusulkan masuk kedalam rencana kerja tahun 2024-2025. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan meliputi: Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalteng (4.1.3.1), Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah (4.1.3.2) dan Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+ (4.1.3.3). Secara umum kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, berikut progress dari masing-masing sub kegiatan tersebut.	b. Terlaksananya 5 kali konsultasi daerah (Adanya kejelasan mekanisme kerja Pokja REDD+, masukan para pemangku kepentingan cara penanganan kendala dan hambatan kelembagaan Pokja REDD+, untuk pelaksanaan kegiatan, arahan kepada Pokja REDD+ terkait kewenangan legal administratif untuk melaksanakan kegiatan) c. 10 kali koordinasi KLHK (Adanya	Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung koordinasi dan konsultasi pada pemangku kepentingan terkait pengelolaan/pelaksanaan REDD+ Di Kalimantan Tengah	



		komitmen dukungan teknis dari KLHK kepada Pokja REDD+ dalam implemnetasi kegiatan)		
	4.1.3.1. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalteng	1 kali konsultasi publik	On Going	10%
	Kegiatan sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan tujuan strategis untuk meningkatkan pemahaman, membangun dukungan luas, serta menghimpun masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan terhadap rencana implementasi REDD+ di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2025 diawali melalui partisipasi aktif Sekretariat Pokja REDD+ Kalimantan Tengah dalam ajang Kalteng Expo 2025 yang diselenggarakan pada 17–23 Mei 2025 di Palangka Raya. Dalam pameran tersebut, Pokja REDD+ menyediakan anjungan informasi yang mempromosikan berbagai aktivitas pelestarian hutan dan pengurangan emisi, khususnya program-program yang didanai melalui Proyek RBP GCF Output 2. Hasil dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi mengenai pentingnya menjaga tutupan hutan untuk menurunkan emisi kepada masyarakat luas serta terciptanya pelibatan publik secara langsung melalui aksi mitigasi. Sebagai bentuk edukasi nyata, Pokja REDD+ membagikan bibit pohon secara gratis kepada pengunjung serta cendera mata berupa pensil dari bahan daur ulang guna mendorong gaya hidup berkelanjutan. Secara keseluruhan, keikutsertaan dalam pameran ini menjadi wadah efektif untuk menyebarluaskan pesan-pesan mitigasi perubahan iklim dan memastikan rencana aksi REDD+ Kalimantan Tengah mendapatkan legitimasi serta dukungan dari publik.		Sampai dengan pelaporan ini, kegiatan baru berupa kegiatan tidak langsung dengan mengikuti/berkontribusi pada 1 pameran yang diikuti oleh Pokja REDD+ Kalteng, sedangkan untuk konsultasi publik belum terlaksana.	
	4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah	5 kali koordinasi daerah	On Going	90%
	Kegiatan koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak akhir tahun 2024 hingga Q3 tahun 2025 guna membangun pemahaman bersama mengenai peran, fungsi, dan tata kelola kelembagaan di tingkat daerah. Rangkaian kegiatan ini dimulai pada Q4 tahun 2024, tepatnya pada 20 November 2024,		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 4 kali pertemuan koordinasi untuk membahas kelembagaan REDD+ Kalimantan Tengah.	



	melalui penyelenggaraan Rapat Terbatas Rancangan Kegiatan Pokja REDD+ di Hotel Aquarius, Palangka Raya. Pertemuan yang melibatkan 31 partisipan ini berhasil menyepakati draf rancangan kegiatan Pokja untuk triwulan berikutnya agar sesuai dengan target proposal. Memasuki Q1 tahun 2025, intensitas koordinasi meningkat melalui dua agenda penting. Pertama, pada 21 Februari 2025, dilaksanakan Rapat Awal Persiapan Penyusunan Arsitektur REDD+ di Hotel Aquarius yang dihadiri oleh 26 perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, BAPPERIDA, dan Dinas Kehutanan. Kedua, pada 27 Maret 2025, rapat lanjutan digelar di kantor BAPPERIDA untuk membahas mekanisme koordinasi, tata cara sosialisasi, dan rencana konsultasi publik terkait implementasi REDD+. Rangkaian pertemuan awal ini menjadi landasan krusial dalam memperjelas pembagian peran antar-OPD dalam struktur arsitektur REDD+ daerah. Pada Q3 tahun 2025, koordinasi diperkuat melalui Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokja REDD+ yang dilaksanakan pada 29 Juli 2025 di Palangka Raya. Forum ini melibatkan 32 peserta dari unsur Pokja REDD+, tim ahli, serta mitra pembangunan untuk mengevaluasi sinergi antar-pemangku kepentingan serta membahas progres penyusunan dokumen FREL/FRL dan rencana aksi daerah sebagai instrumen implementasi. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini berhasil mencapai hasil strategis berupa terwujudnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan Pokja REDD+, yang memastikan seluruh agenda penurunan emisi di Kalimantan Tengah berjalan secara terorganisir dan akuntabel.		
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+	10 kali koordinasi KLHK	On Going	30%
Kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+ dilaksanakan secara berkesinambungan sejak akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025 untuk menghimpun masukan serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat. Rangkaian ini dimulai pada Q4 tahun 2024, tepatnya tanggal 18–20 Desember 2024, di mana tim BAPPERIDA Kalimantan Tengah (4 orang (2 laki-laki dan 2 perempuan) melakukan koordinasi dengan Direktorat IGRK KLHK di Jakarta mengenai		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 3 kali kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi ke KLHK untuk membahas dan menguatkan implementasi REDD+ Kalimantan Tengah.	



	persyaratan arsitektur REDD+ sesuai Cancun Agreement, yang mencakup Strategi/Rencana Aksi, NFMS-MRV, dan FREL/FRL. Pada Q1 tahun 2025, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah (5 orang (3 laki-laki dan 2 perempuan)) melanjutkan konsultasi pada 10–12 Februari 2025 di Ruang RKKIK Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) KLHK. Hasil strategis dari pertemuan ini adalah rekomendasi perlunya analisis yang lebih tajam terhadap faktor-faktor pendorong (drivers) deforestasi dan degradasi hutan agar program yang disusun menjawab kebutuhan secara tepat sasaran. Dalam periode yang sama, tim juga berkoordinasi dengan BPDH untuk membahas mekanisme penganggaran dalam skema RBP serta standar biaya yang berlaku. Selanjutnya, pada Q2 tahun 2025, tiga perwakilan Pokja REDD+ Kalimantan Tengah (3 orang (2 laki-laki dan 1 perempuan)) berpartisipasi dalam kegiatan Diseminasi Indeks Akses Desa (IAD) di Jakarta pada 20–23 April 2025. Keikutsertaan ini menghasilkan penguatan pemahaman mengenai penggunaan instrumen IAD berbasis Perhutanan Sosial sebagai salah satu alat pendukung pelaksanaan REDD+ di tingkat tapak. Secara keseluruhan, rangkaian koordinasi ini telah memberikan informasi untuk memastikan keselarasan kebijakan dan memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan guna menjamin keberhasilan implementasi REDD+ yang partisipatif di Provinsi Kalimantan Tengah.		
--	--	--	--



[Foto. Sosialisasi dan promosi program RBP REDD+ melalui Pameran Kalteng Expo 2025 tanggal 17 – 23 Mei 2025]

4.2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan REDD+ sbb nasional Prov Kalteng	4.2.1. Penyusunan FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya 1 dokumen FREL/FRL provinsi Kalteng, dengan milestones per sub aktivitas yaitu:	Tercapai	100%
	Kegiatan penyusunan dokumen FREL/FRL didukung oleh lima subkegiatan, yaitu: (1) Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL (4.2.1.1); (2) Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan FREL/FRL (4.2.1.2); (3) Ground truthing/pengecekan lapangan terhadap keakuratan tutupan lahan dan citra satelit (4.2.1.3); (4) FGD Penyusunan FREL/FRL (4.2.1.4); dan (5) Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah (4.2.1.5). Dari lima subkegiatan tersebut, empat subkegiatan dalam proposal masuk ke dalam rencana kerja tahun 2025, sedangkan satu subkegiatan, yaitu konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri (4.2.1.5), masuk ke dalam rencana kerja tahun 2026. Dalam rencana kerja tahun 2025, satu sub kegiatan tidak dilaksanakan, yaitu ground truthing/pengecekan lapangan terhadap keakuratan tutupan lahan dan citra satelit (4.2.1.3). Ketidaksiaksanaan subkegiatan ini merupakan hasil diskusi teknis dengan tenaga ahli, mengingat kebutuhan data hanya sampai	a. terlaksananya 1 kali konsultasi publik b. terlaksananya 2 kali pelatihan penyusunan FREL/FRL c. terlaksananya 1 kali ground truthing di 14 kab/kota d. terlaksananya 5 kali FGD penyusunan FREL/FRL d. terlaksananya 5 kali koordinasi KLHK	Sampai dengan pelaporan pelaporan ini, telah tersedia 1 dokumen FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah.	



	pada tier 2, dan tidak perlu tier 3 yang membutuhkan verifikasi lapangan. Sementara itu, sub kegiatan konsultasi yang semula direncanakan pada tahun 2026 telah dilaksanakan lebih awal. Dengan demikian, kegiatan penyusunan dokumen FREL/FRL telah dilaksanakan melalui empat sub kegiatan, meliputi:			
	4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL	1 kali konsultasi publik	Tercapai	100%
	Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL dilaksanakan secara intensif pada Q3 tahun 2025 dengan tujuan untuk menyelaraskan pandangan serta melakukan validasi teknis agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan kebijakan nasional. Penyelenggaraan Konsultasi Publik pada 25 Juli 2025 di Palangka Raya yang melibatkan 93 partisipan dari unsur BAPPERIDA, Pokja REDD+ Kalteng, seluruh KPH se-Provinsi, akademisi, praktisi, hingga perwakilan KLHK. Forum ini berhasil menjadi wadah strategis dalam menghimpun masukan multipihak guna memastikan penyusunan dokumen FREL/FRL Kalimantan Tengah berjalan secara partisipatif dan akuntabel. Agenda tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan Finalisasi Penyusunan Dokumen FREL/FRL yang dilaksanakan pada 8–9 Agustus 2025 di Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh 14 partisipan (9 laki-laki dan 5 perempuan) ini menggunakan metode diskusi interaktif untuk membedah outline setiap bab dan memantapkan struktur narasi dokumen. Hasil akhir dari rangkaian kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen final FREL/FRL dengan penetapan periode referensi 2011–2020 dan rata-rata emisi historis sebesar 27,6 juta tCO₂e/tahun. Capaian ini sangat krusial sebagai dasar penetapan tingkat acuan emisi dan serapan karbon sektor kehutanan yang kredibel bagi Provinsi Kalimantan Tengah.		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 1 konsultasi public terkait FREL/FRL, dan 1 kegiatan pendukung untuk finalisasi dokumen FREL/FRL	
	4.2.1.2. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan FREL/FRL	2 kali pelatihan penyusunan FREL/FRL	On Going	50%
	Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan FREL/FRL dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas teknis para pemangku kepentingan dalam memahami metodologi, pengumpulan data, analisis, serta pelaporan emisi dan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Rangkaian kegiatan ini dimulai pada Q2 tahun 2025,		Sampai dengan pelaporan ini, sudah dilakukan 1 kali peningkatan kapasitas penyusunan FREL/FRL melalui format FGD.	



	pelatihan/bimbingan teknis ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) persiapan penyusunan FREL/FRL yang diselenggarakan pada 30 April 2025 di Palangka Raya. Kegiatan ini melibatkan 89 partisipan yang terdiri dari 63 laki-laki dan 26 perempuan, mencakup perwakilan dari BAPPERIDA, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, serta mitra pembangunan. Dalam forum tersebut, sejumlah pakar memberikan paparan strategis, di antaranya adalah perwakilan Direktorat IGRK KLHK mengenai pengembangan FREL dan pengukuran kinerja REDD+, pakar dari Universitas Kyoto terkait cetak biru FREL Kalimantan Tengah, serta akademisi Universitas Palangka Raya yang membahas struktur FRL, sistematika perhitungan, dan isu kebakaran hutan. Hasil dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya kebutuhan data teknis dan rumusan permasalahan terkait pembaruan alokasi stok karbon serta emisi di tingkat provinsi. Capaian ini menjadi landasan awal yang krusial dalam memastikan dokumen FREL/FRL yang sedang disusun memiliki metodologi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar nasional dan internasional.			
	4.2.1.3. Ground truthing/pengecekan lapang keakurasian tutupan lahan dan citra satelit Kegiatan ini tidak dilakukan. Ketidaksihaksanaan subkegiatan ini merupakan hasil diskusi teknis dengan tenaga ahli, mengingat kebutuhan data hanya sampai pada tier 2, dan tidak perlu tier 3 yang membutuhkan verifikasi lapangan.	1 kali ground truthing di 14 kab/kota	Tidak dilakukan	0%
			--	
	4.2.1.4. FGD Penyusunan FREL/FRL FGD Penyusunan FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan secara intensif sepanjang tahun 2025 dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, membahas metodologi yang relevan, serta menyepakati pendekatan teknis dalam pembaruan alokasi stok karbon dan estimasi emisi tingkat provinsi. Rangkaian kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi intensif antara berbagai instansi pemerintah daerah, akademisi, dan tenaga ahli teknis. Instansi terlibat meliputi BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Pokja REDD+ Kalteng yang juga termasuk akademisi dari Universitas	5 kali FGD penyusunan FREL/FRL	Tercapai	100%
			Sampai dengan pelaporan ini, dilakukan 9 kali pertemuan untuk menyusun penyusunan FREL/FRL, dari 9 kegiatan ini, terdapat 1 FGD, 1 kali workshop, dan 7 rapat pertemuan tim penyusunan dokumen FREL/FRL.	



	Palangka Raya, mitra pembangunan, tim ahli/konsultan yang menguasai metodologi perhitungan karbon untuk memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen tersebut. Rangkaian kegiatan dimulai pada Q2 tahun 2025 melalui rapat pada 5 Juni 2025 (25 partisipan (17 laki-laki, 8 perempuan)) untuk membahas tugas tim ahli, dilanjutkan pada 13 Juni 2025 (13 partisipan (9 laki-laki, 4 perempuan)) untuk menyusun outline dan rumusan perhitungan <i>activity data</i>, serta rapat teknis pada 20–23 Juni 2025 (11 partisipan (8 laki-laki, 3 perempuan)) yang membahas simulasi prosedur perhitungan FRL. Hasil dari rangkaian awal ini adalah terbentuknya kerangka awal dokumen FREL/FRL. Memasuki Q3 2025, intensitas kegiatan meningkat melalui rapat pembahasan hasil sementara pada 1 Juli dan 14 Juli 2025 (10 partisipan (7 laki-laki, 3 perempuan)) untuk memverifikasi data aktivitas dan faktor emisi, serta pertemuan pada 28 Juli 2025 (9 partisipan (6 laki-laki, 3 perempuan)) guna menyusun narasi presentasi FRL yang lebih komunikatif. Selanjutnya, pada 4 Agustus 2025 (25 partisipan (18 laki-laki, 7 perempuan)), dilaksanakan FGD untuk memperbarui progres dokumen, yang diikuti dengan rapat sinkronisasi data pada 4 September 2025 (9 partisipan (6 laki-laki, 3 perempuan)) bersama BAPPERIDA. Triwulan ini ditutup dengan pelaksanaan Workshop Perhitungan Result of Construction FREL/FRL pada 29–30 September 2025 di Palangka Raya yang melibatkan 24 partisipan (17 laki laki, 7 perempuan) dari unsur akademisi dan pemerintah untuk mendalami teknis perhitungan karbon. Pada Q4 2025, aktivitas difokuskan pada penyelesaian akhir melalui dukungan tenaga ahli teknis. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini berhasil mencapai hasil strategis berupa tersusunnya dokumen final FREL Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dasar penetapan tingkat acuan emisi dan serapan karbon sektor kehutanan di daerah. Rangkaian koordinasi ini memastikan bahwa seluruh perhitungan mengacu pada pedoman IPCC dan selaras dengan standar nasional.			
	4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	5 kali koordinasi KLHK	On Going	70%



	Kegiatan konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait penyusunan FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan secara intensif sepanjang tahun 2025 untuk memastikan keselarasan substansi dan metodologi dengan kebijakan nasional. Pada Q2 tahun 2025, tepatnya tanggal 1–3 Juni 2025, sebanyak tujuh perwakilan (3 laki-laki, 4 perempuan) Pokja REDD+ Kalteng melakukan konsultasi di Bogor bersama Ketua Pokja IGRK dan MRV KLHK yang menghasilkan kesepakatan mengenai pendekatan dasar pengukuran serta metode perhitungan FRL yang akan digunakan. Memasuki Q3 tahun 2025 pada 31 Juli 2025, koordinasi dilanjutkan oleh 6 partisipan (4 laki-laki, 2 perempuan) dari BAPPERIDA dan Pokja REDD+ dengan Direktorat IPSDH KLHK untuk mengajukan kerja sama bagi pakai data dan informasi geospasial, guna menjamin akurasi data dalam penyusunan arsitektur REDD+ daerah sesuai standar nasional. Pada Q4 tahun 2025, rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 1–3 Oktober 2025 di Jakarta oleh 5 partisipan (1 laki-laki, 4 perempuan) yang berfokus pada aspek teknis perhitungan baseline dan uncertainty menggunakan Monte Carlo Simulation bersama tenaga ahli KLHK. Konsultasi ini memberikan hasil strategis berupa rekomendasi bahwa FREL sub-nasional dapat disusun sebagai turunan dari FREL nasional dengan menggunakan pendekatan jurisdictional nested REDD+ yang terintegrasi dengan target NDC dan Sistem Registri Nasional (SRN). Sebagai kegiatan pendukung, pada 5–7 Oktober 2025, tim juga menghadiri agenda penutupan proyek RBP REDD+ GCF Output 1 di Jakarta untuk melakukan sinkronisasi dan memberikan masukan terhadap keberlanjutan program (5 orang partisipan, 4 laki-laki, 1 perempuan). Secara keseluruhan, rangkaian konsultasi ini berhasil memperkuat legitimasi dokumen FREL/FRL Kalimantan Tengah dan memberikan arahan teknis yang krusial bagi penyusunan dokumen final.		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 3 kali kegiatan koordinasi dan 1 kali kegiatan pendukung koordinasi.
--	---	--	--



[Foto. FGD persiapan penyusunan FREL/FRL REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 April 2025]

4.2.2. Penyusunan/Revisi Dokumen REDD+	Adanya 1 dokumen rencana strategis dan aksi REDD+ Prov Kalteng, dengan milestones per sub kegiatan yaitu:	Tercapai	100%
Kegiatan penyusunan/revisi dokumen REDD+ ini didukung oleh serangkaian sub kegiatan. Dalam rencana kerja usulan proposal, kegiatan tersebut direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Namun, dalam implementasinya, dari tujuh sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, lima sub kegiatan telah dilaksanakan lebih awal. Pelaksanaan ini merupakan kebutuhan ditingkat tapak, mengingat Pokja REDD+ Kalteng telah direvitalisasi. Adapun sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:	a. 5 kali rapat persiapan penyusunan renstra REDD+ b. 5 kali pertemuan penyusunan Renstra REDD+ c. 1 Dokumen Draft Renstra REDD+ d. 5 kali Koordinasi daerah e. 1 kali konsultasi publik Draft Renstra REDD+ f. 5 kali Konsultasi KLHK	Sampai dengan pelaporan ini, telah disusun 1 dokumen rencana strategi aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah	



	4.2.2.2. Pelatihan dan / atau Bimtek penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+	2 kali bimtek penyusunan Renstra REDD+	On Going	50%
	Kegiatan Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Aksi Strategi REDD+ bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam merumuskan perencanaan strategis yang selaras dengan kebijakan nasional, menetapkan prioritas aksi mitigasi berbasis lahan, serta memastikan integrasi program REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan berkelanjutan. Implementasi kegiatan ini dilakukan melalui dua tahapan utama yang mencakup pembelajaran praktik terbaik dari wilayah lain serta pelatihan teknis bagi aparatur daerah. Rangkaian kegiatan diawali pada 22 - 24 Mei 2025, dilaksanakan bimbingan teknis utama di Palangka Raya yang dihadiri oleh 70 partisipan (50 laki-laki dan 20 perempuan) dari berbagai instansi, termasuk BAPPERIDA, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, serta perwakilan KPH se-Kalimantan Tengah. Pelatihan ini difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai arsitektur REDD+ serta identifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk menyusun dokumen rencana aksi daerah. Hasil dari Bimtek ini adalah meningkatnya kapasitas teknis para pemangku kepentingan dalam merancang strategi mitigasi yang lebih tajam dan akomodatif terhadap kondisi spesifik di Kalimantan Tengah.		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 1 kali bimbingan teknis penyusunan renstra REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah.	
	4.2.2.3. Penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+ Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Aksi Strategi REDD+ bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi program REDD+ di Kalimantan Tengah. Sepanjang tahun 2025, implementasi kegiatan ini dilaksanakan melalui dua fase besar yang melibatkan serangkaian pertemuan teknis dan koordinasi lintas sektor guna memastikan integrasi program dengan perencanaan pembangunan daerah. Pada Q3 tahun 2025, rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan persiapan pada 4 Juli 2025 di Palangka Raya (5 peserta: 2 laki-laki, 3 perempuan) untuk membahas prinsip dan outline dokumen. Proses dilanjutkan dengan	5 kali pertemuan penyusunan Renstra REDD+	Tercapai	100%
			Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 10 kali pertemuan untuk penyusunan renstra REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah.	



	pembahasan hasil sementara di Jakarta pada 12–13 Juli 2025 (9 peserta: 7 laki-laki, 2 perempuan) serta rapat metodologi pengumpulan data pada 23 - 27 Juli 2025 di Palangka Raya (12 peserta: 8 laki-laki, 4 perempuan). Intensitas penyusunan meningkat pada bulan Agustus melalui rapat progres pada 12 - 13 Agustus 2025 (14 peserta: 10 laki-laki, 4 perempuan) dan Forum Group Discussion (FGD) besar pada 15 Agustus 2025 di Palangka Raya yang dihadiri 76 peserta (52 laki-laki, 24 perempuan) untuk menyusun diagram pohon masalah deforestasi. Penyusunan strategi program REDD+ tingkat yuridiksi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 - 31 Agustus 2025 di Kantor Penabulu, Jakarta (15 peserta: 12 laki-laki dan 3 perempuan). Fase ini ditutup dengan rapat terbatas di Kantor BAPPERIDA Kalimantan Tengah pada 3 September 2025 (21 peserta: 13 laki-laki, 8 perempuan) yang menyepakati bahwa dokumen Rencana Aksi REDD+ harus menjadi acuan lintas sektor yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Memasuki Q4 tahun 2025 2025, aktivitas difokuskan pada penajaman strategi yurisdiksi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pada 16 - 18 Oktober 2025 di Jakarta, dilaksanakan diskusi penguatan strategi berbasis standar ART TREES yang memproyeksikan target penurunan emisi sebesar 20% (6 juta ton CO 2 eq/tahun) dengan asumsi pembayaran pertama pada 2028 (4 laki-laki). Penajaman substansi berlanjut melalui reviu draf dan pembahasan Theory of Change (ToC) pada 21 - 23 Oktober 2025 di Palangka Raya (14 peserta: 11 laki-laki, 3 perempuan). Rangkaian ini memuncak pada akhir tahun melalui rapat koordinasi pemanfaatan NEK pada 22 Desember 2025 (4 laki-laki) serta FGD realokasi anggaran program RBP GCF pada 23 Desember 2025 (24 peserta: 21 laki-laki, 3 perempuan) yang menyepakati prioritas intervensi pada 10 KPH strategis. Secara keseluruhan, rangkaian aktivitas ini berhasil menghasilkan draf final Rencana Aksi REDD+ yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat adat dan pelaku usaha			
4.2.2.4. Penyusunan draf Renstra REDD+		1 dokumen draft Renstra REDD+	Tercapai	100%
Pada periode pelaporan Q4 tahun 2025, aktivitas ini telah mencapai status terlaksana dengan capaian output berupa satu dokumen draf Renstra REDD+ Kalimantan Tengah yang telah selesai disusun. Fokus implementasi pada kuartal ini mencakup finalisasi dokumen dan			Sampai dengan pelaporan in, sudah ada 1 draft dokumen Renstra REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah.	



	pembiayaan bagi konsultan tenaga ahli yang bertanggung jawab penuh dalam merampungkan seluruh substansi draf tersebut.		
	4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+	1 kali konsultasi publik	Tercapai 100%
	Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ bertujuan untuk menyosialisasikan isi dan substansi draf Rencana Strategis (Renstra) REDD+ kepada seluruh pemangku kepentingan guna menjaring masukan konstruktif demi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Implementasi kegiatan ini dilakukan oleh Pokja REDD+ Kalteng dengan dua tahapan utama pada tahun 2025, diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) pada 14 Agustus 2025 di Palangka Raya, yang melibatkan 68 laki-laki dan 28 perempuan dari unsur pemerintah, NGO, dan perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Rangkaian ini dilanjutkan dengan Konsultasi Publik Draft Final pada Jumat, 24 Oktober 2025, di lokasi yang sama, dengan partisipasi 72 laki-laki dan 29 perempuan yang mencakup perwakilan pemerintah pusat, instansi vertikal, KPHP, akademisi, hingga sektor swasta. Dalam pertemuan tersebut, dibahas poin-poin strategis terkait arah kebijakan nasional REDD+ dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, serta empat strategi kunci REDD+ yang meliputi transformasi tata kelola, partisipasi masyarakat, penguatan kebijakan sumber daya alam, dan keberlanjutan ekologis. Hasil dari konsultasi ini memberikan landasan penting bagi sinkronisasi data dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta penguatan aspek sosial termasuk perlindungan wilayah adat dan peluang akses pendanaan berbasis kinerja. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah melakukan penyusunan draf final SRAP REDD+ 2026–2027, pendataan wilayah adat dan lokasi Perhutanan Sosial sebagai prioritas intervensi, serta penyusunan roadmap penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk memastikan implementasi REDD+ yang inklusif dan akuntabel pada tanggal 27 - 28 Oktober 2025 di Pangkalan Bun (15 partisipan, (10 laki-laki, 5 orang perempuan)), Kotawaringin Barat dilakukan rapat finalisasi penyusunan rencana aksi REDD+ dan Draft FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini membahas finalisasi substansi Rencana Aksi REDD+ dan Bab hasil perhitungan FREL/FRL, termasuk analisis pohon masalah, tantangan struktural		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 1 kali konsultasi publik terkait dokumen Renstra REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah yang didukung dengan 2 kegiatan lain yaitu 1 FGD, 1 rapat finalisasi dokumen.



	dan sosial implementasi REDD+, keselarasan visi-misi dengan arah pembangunan daerah 2025–2029, strategi pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, serta sinergi pendanaan pemerintah dan mitra pembangunan.			
	4.2.2.7. Koordinasi dengan KLHK terkait penyusunan rencana strategis dan aksi REDD+	5 kali konsultasi KLHK	On Going	20%
	Kegiatan Koordinasi dengan KLHK terkait penyusunan rencana strategis dan aksi REDD+ dilaksanakan untuk menyelaraskan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan, pedoman, dan kerangka kerja REDD+ nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Implementasi kegiatan ini pada Q4 tahun 2025 diwujudkan melalui dua rangkaian agenda strategis yang melibatkan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah. Agenda pertama adalah partisipasi dalam rapat koordinasi sinkronisasi dan kolaborasi bidang tata lingkungan yang dilaksanakan pada 24 - 27 November 2025 di Tangerang, Banten. Pertemuan ini menghasilkan poin penting terkait penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Tahun 2025 sebagai basis analisis jasa lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan seperti kebutuhan pemutakhiran data berkala dan penguatan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, pada 1 Desember 2025, tim mengikuti lokakarya strategis di Jakarta mengenai mekanisme pasar karbon guna meningkatkan pemahaman terkait strategi menarik investasi melalui prinsip additionality yang terverifikasi serta pengakuan manfaat tambahan (<i>co-benefits</i>) seperti ketahanan ekosistem dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.		Sampai dengan pelaporan ini, kegiatan baru dilakukan untuk kegiatan pendukung (2 kali kegiatan)	



[Foto. Peningkatan kapasitas stakeholder dalam implementasi penyusunan rencana aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 – 23 Mei 2025]

4.2.3. Penyiapan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Pengurangan Emisi (MRV) Sub Nasional	Adanya 1 dokumen Panduan MRV Prov Kalteng, dengan milestones per sub kegiatan yaitu:	On Going	10%
Kegiatan penyiapan pengukuran, pelaporan dan verifikasi pengurangan emisi (MRV) di dukung oleh lima sub kegiatan meliputi: Persiapan pelaksanaan penyusunan MRV (4.2.3.1), Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan MRV (4.2.3.2), Penyusunan draft MRV (konsinyasi dan konsultasi) (4.2.3.3), Koordinasi daerah terkait penyusunan MRV (4.2.3.4), dan Koordinasi dengan KLHK terkait penyusunan MRV (4.2.3.5). Dari kelima sub aktivitas ini, hanya satu sub kegiatan yang masuk kedalam perencanaan tahun 2025, yaitu penyusunan draft MRV. Dan dalam pelaksanaannya kebutuhan MRV ini dilakukan penyesuaian, dengan melaksanakan lebih awal 2 sub kegiatan, yaitu persiapan penyusunan MRV (4.2.3.1) dan pelatihan/bimtek MRV (4.2.3.2). Berikut progress kegiatan yang telah dilakukan	a. 5 kali rapat persiapan penyusunan b. 2 kali bimtek c. 5 kali pertemuan penyusunan d. 5 kali Koordinasi daerah e. 5 kali Konsultasi KLHK	Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 1 pertemuan persiapan penyusunan MRV dan 1 kali kegiatan Bimtek MRV.	
4.2.3.1. Persiapan pelaksanaan penyusunan MRV	5 kali rapat persiapan penyusunan MRV	On Going	20%



	Kegiatan Persiapan Penyusunan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman teknis tim MRV provinsi mengenai prinsip dan metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi. Implementasi kegiatan ini diwujudkan melalui pertemuan strategis pada 16 Mei 2025 di Palangka Raya yang melibatkan 28 partisipan (24 laki-laki dan 4 perempuan) terdiri dari unsur Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BAPPERIDA, akademisi Universitas Palangka Raya, serta praktisi ahli. Dalam pertemuan tersebut, dihadirkan narasumber dari Koordinator Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi untuk memaparkan praktik baik dan pengalaman Jambi dalam mengelola program penurunan emisi berbasis yurisdiksi sebagai rujukan replikasi bagi Kalimantan Tengah. Hasil dari rangkaian aktivitas ini adalah tersusunnya kerangka awal sistem MRV sub-nasional serta adanya kesepakatan langkah kerja menuju penyusunan dokumen MRV resmi yang selaras dengan standar nasional. Sebagai tindak lanjut strategis, tim saat ini tengah melakukan koleksi data teknis dari berbagai walidata resmi di tingkat daerah guna memastikan ketersediaan basis data yang akurat untuk operasionalisasi sistem MRV di masa mendatang.		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 1 pertemuan persiapan penyusunan MRV.	
	4.2.3.2. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan MRV Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan MRV bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis mendalam mengenai konsep, prinsip, dan kerangka kerja Measurement, Reporting, and Verification (MRV) dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Implementasi kegiatan ini pada Triwulan IV 2025 diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Penghitungan Emisi GRK Provinsi Kalimantan Tengah Seri 1 yang dilaksanakan pada 15 - 16 Desember 2025. Workshop ini melibatkan 66 partisipan (44 laki-laki dan 22 perempuan) yang terdiri dari perwakilan Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, perwakilan 18 KPHP se-Kalimantan Tengah, akademisi dari Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta mitra pembangunan seperti Yayasan Penabulu dan WWF. Hasil utama dari workshop ini adalah meningkatnya kapasitas teknis peserta dalam	2 kali bimtek penyusunan MRV	On Going	50%
			Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 1 kali bimtek MRV.	



	menghitung emisi dan serapan karbon menggunakan pendekatan stock-difference yang mencakup berbagai sektor, seperti deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta dekomposisi gambut. Peserta juga dibekali keterampilan penggunaan perangkat lunak GIS dan JERP Toolbox untuk analisis data spasial, serta teknik penyajian data melalui Diagram Sankey guna memvisualisasikan penggerak deforestasi. Capaian ini menjadi bagian penting penyusunan Forest Reference Level (FRL) dan sistem MRV sub-nasional yang akuntabel. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan meneruskan proses koleksi data dari berbagai walidata untuk memfinalisasi dokumen MRV resmi yang selaras dengan standar nasional dan internasional.			
	4.2.3.3. Penyusunan draft MRV (konsinyasi dan konsultasi) Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target tersedianya Tim Konsultan untuk MRV, kegiatan belum dilakukan.	5 kali konsinyasi/konsultasi dan tim konsultan MRV tersedia	Belum terlaksana	0% Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.
  Google Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia Qw79+383, Jl. Menteng I, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah [Foto. Pertemuan tim MRV sekretariat dengan pakar MRV, untuk penyusunan program dan rencana				



<i>kegiatan terkait pemantauan, pengukuran, dan pelaporan pada Sekretariat Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Mei 2025]</i>				
	4.2.4. Penyusunan dokumen Benefit Sharing Plan	Adanya 1 dokumen benefit sharing mechanism (BSM) REDD+ Kalteng, dengan milestones per sub kegiatan yaitu:	On Going	5%
	Kegiatan penyusunan dokumen benefit sharing plan didukung dengan beberapa sub aktivitas. Dari rencana kerja proposal, kegiatan penyusunan ini tidak masuk kedalam rencana kerja tahun 2024-2025. Namun dalam implementasinya terdapat satu sub kegiatan yang telah mulai dilakukan yaitu kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan donor terkait RBP Kalimantan Tengah (4.2.4.7). Berikut progress kegiatannya.	a. 1 kali rapat persiapan penyusunan b. 2 kali Bimtek penyusunan BSM c. 5 kali pertemuan penyusunan dokumen BSM d. 5 kali koordinasi daerah e. 1 kali konsultasi publik f. 5 kali koordinasi KLHK g. 3 kali konsultasi dengan calon donor	Sampai dengan pelaporan baru dilakukan 1 kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi calon donor	
	4.2.4.7. Koordinasi dan konsultasi dengan Donor terkait RBP Kalteng	3 kali konsultasi donor	On Going	5%
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Donor terkait RBP Kalteng dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat komunikasi, sinergi, dan keselarasan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak donor dalam pelaksanaan Result-Based Payment (RBP) REDD+. Implementasi kegiatan pada Q4 tahun 2025 diawali dengan partisipasi aktif dalam agenda “J-REDD and Nesting Buyers Club” pada acara Carbon Digital Conference (CDC) 2025. Pertemuan strategis ini diselenggarakan pada 8 Desember 2025 bertempat di Bandung Institute of Technology (ITB) oleh Kementerian Kehutanan bersama Indonesia Carbon Trade Association. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari Yayasan Penabulu sebagai partisipan yang mewakili kepentingan koordinasi di tingkat daerah. Hasil dari koordinasi ini memberikan wawasan krusial bahwa Kalimantan Tengah saat ini berada pada fase transisi menuju penerapan Jurisdictional REDD+ (J-REDD+) dan penguatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Diskusi dalam konferensi tersebut menyoroti		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 1 kali kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan konsultasi donor terkait RBP Kalimantan Tengah.	



pentingnya pendekatan hybrid atau decentralized nesting bagi Kalimantan Tengah untuk melindungi proyek-proyek eksisting berbasis gambut dan rehabilitasi dari risiko ketidaksesuaian baseline serta mencegah double counting.



[Foto. Partisipasi pada agenda “J-REDD and Nesting Buyers Club” Carbon Digital Conference (CDC) 2025, Bandung Institute of Technology (ITB) tanggal 8 Desember 2025]

4.2.5. Penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+ (termasuk FGRM, input Web SIS REDD+)	Adanya 1 dokumen safeguard REDD+ prov Kalteng (termasuk FGRM, input Web SIS REDD+), dengan	Tercapai	100%
Penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+ didukung dengan dukungan sub kegiatan, meliputi FGD Persiapan Penyusunan		Sampai dengan pelaporan ini, telah disusun 1 dokumen	



	Safegurad REDD+ tingkat Provinsi Kalteng (4.2.5.1), Pelatihan dan/atau Bimtek Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi Kalteng (4.2.5.2), Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi (konsultan dan konsinyasi) (4.2.5.3), Koordinasi daerah terkait penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+ (4.2.5.4), Koordinasi dengan KLHK terkait penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+ (4.2.5.5), dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait input data Safeguards Kalteng ke SRN dan web SIS REDD (4.2.5.6). Keenam sub kegiatan ini masuk kedalam perencanaan proposal tahun 2025. Namun dalam pelaksanaannya, hanya sub kegiatan meliputi FGD penyusunan (4.2.5.1) dan Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi (konsultan dan konsinyasi) (4.2.5.3) yang dilaksanakan. Berikut informasi progress kegiatannya.	milestones per sub kegiatan yaitu: a. 1 kali rapat persiapan penyusunan b. 2 kali Bimtek penyusunan c. 15 kali koordinasi/konsinyasi d. 5 kali konsultasi daerah e. 5 kali koordinasi KLHK f. 3 dokumen Laporan	safeguard REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah.	
	4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	1 kali FGD	Tercapai	~ 100%
	Kegiatan Persiapan Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi) dilaksanakan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan koordinasi teknis sepanjang tahun 2025 untuk membangun sistem pengamanan sosial dan lingkungan yang akuntabel. Tahap awal dimulai pada 23 Januari 2025 di Palangka Raya dengan melibatkan 44 peserta (22 laki-laki dan 22 perempuan) dari unsur DLH, Bappeda, dan Dinas Kehutanan, dengan menghadirkan narasumber dari KLHK (Direktorat MPI) serta DLH Provinsi Aceh sebagai rujukan penyusunan. Hasil dari tahap pertama ini adalah diperolehnya gambaran dasar mengenai jenis data yang diperlukan serta kerangka pengamanan yang harus dipenuhi oleh Kalimantan Tengah. Memasuki Q2 tahun 2025, pendalaman dilakukan melalui FGD pada 15 dan 25 April 2025 yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, Tim Ahli, dan Yayasan Penabulu (32 partisipan, 19 laki-laki, 7 perempuan) untuk mengidentifikasi kebutuhan implementasi berdasarkan 7 Prinsip, 17 Kriteria, dan 32 Indikator safeguard. Pada periode ini, koordinasi diperluas dengan melibatkan OPD pengampu data lainnya guna memastikan seluruh indikator dapat terpenuhi secara komprehensif. Selanjutnya pada Q3 tahun 2025, tepatnya tanggal 24 Juli dan 11 Agustus 2025, diselenggarakan FGD lanjutan yang menghadirkan praktisi safeguard nasional untuk		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 14 kali pertemuan/FGD untuk penyusunan dokumen safeguard Provinsi Kalimantan Tengah.	



	menyelaraskan pemahaman mengenai mekanisme Sistem Informasi Safeguard (SIS-REDD) serta penentuan periode data Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS), yang melibatkan 46 partisipan (27 laki-laki, 19 perempuan). Pada Q4 tahun 2025 difokuskan pada pemantapan kerangka kerja, pengolahan data Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS), serta simulasi sistem pelaporan. Rangkaian aktivitas dimulai pada bulan Oktober, diawali dengan rapat perencanaan pada 8 Oktober 2025 untuk menentukan struktur personel Tim Pendukung dan operator SIS-REDD yang melibatkan 12 partisipan (6 laki-laki, 6 perempuan). Hal ini dilanjutkan dengan rangkaian FGD teknis pada 12 dan 13 Oktober 2025 yang dipandu oleh Tenaga Ahli Safeguard, untuk melakukan simulasi penginputan data ke sistem SIS-REDD serta identifikasi APPS berdasarkan standar Cancun dan ART-TREES, yang melibatkan 34 partisipan (21 laki-laki, 13 perempuan). Pada 31 Oktober 2025, dilaksanakan FGD pemantapan yang melibatkan 15 peserta (8 laki-laki dan 7 perempuan) untuk membagi tugas penulisan dokumen Summary of Safeguard (SoS) yang progresnya telah mencapai 70%. Pada bulan November 2025, intensitas kegiatan meningkat dengan dilaksanakannya perapihan basis data digital pada 5 November 2025 (4 laki-laki, 5 perempuan), disusul rapat penyusunan rencana kegiatan safeguard tahun 2026 pada 7 November 2025 yang melibatkan 8 peserta. Tim pendukung juga melakukan perekapan anggaran periode 2013–2023 pada 8 November 2025 (20 laki-laki, 10 perempuan), dengan temuan sementara sebesar Rp729,3 miliar dari APBD dan Rp180,8 miliar dari APBN. Memasuki akhir bulan, tepatnya pada 29 November 2025 (7 laki-laki, 5 perempuan), FGD progres dokumen menunjukkan bahwa penyusunan Summary Safeguard telah mencapai Bab IV dengan target penyelesaian draf final pada pertengahan Desember. Sebagai tahap akhir di bulan Desember 2025, dilaksanakan workshop rekapitulasi data pada 17 - 18 Desember 2025 yang melibatkan 16 partisipan (8 laki-laki, 8 perempuan). Hasil dari workshop ini adalah terkumpulnya 190 data pendukung, meski masih teridentifikasi kekurangan data pada aspek kesetaraan gender dan dokumen Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat adat. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan memastikan		
--	---	--	--



	dokumen kerangka pengaman sosial dan lingkungan Kalimantan Tengah tersusun secara transparan, akuntabel, dan siap diunggah ke sistem nasional sebelum akhir tahun anggaran.			
	4.2.5.2. Pelatihan dan/atau Bimtek Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	2 kali bimtek penyusunan safeguard REDD+	Belum terlaksana	0%
	Capaian penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini baru berada pada tahap penelarasan pemahaman mengenai mekanisme Sistem Informasi Safeguard (SIS-REDD+) serta penentuan periode data untuk Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS). Pada tahapan ini, proses yang telah dilakukan mencakup penyusunan Dokumen Summary APPS dan penginputan informasi ke dalam laman/website SIS-REDD+. Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dilaksanakan karena penyusunan dokumen Safeguard REDD+ secara utuh masih menunggu kejelasan dan kesepakatan terkait bentuk/skema REDD+ yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah. Penentuan skema ini menjadi dasar penting karena akan memengaruhi pendekatan, kebutuhan data, tata kelola, serta rujukan standar yang harus digunakan dalam penyusunan safeguard. Meskipun demikian, kebutuhan untuk membangun sistem pengamanan sosial dan lingkungan yang akuntabel dalam konteks REDD+ di Kalimantan Tengah telah disadari dan menjadi komitmen bersama. Oleh karena itu, disepakati bahwa penyusunan dokumen Safeguard REDD+ Kalimantan Tengah akan dilanjutkan dan diperkuat setelah skema REDD+ yang dipilih ditetapkan, baik berupa pendekatan yurisdiksi maupun VCM (Voluntary Carbon Market), termasuk penetapan standar yang menyertainya.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	4.2.5.3. Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi (konsultasi dan konsinyasi)	15 kali koordinasi/konsinyasi	On Going	20%
	Kegiatan Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi bertujuan untuk mengembangkan kerangka safeguard yang selaras dengan kebijakan nasional, standar internasional, serta konteks lokal di Kalimantan Tengah. Implementasi kegiatan pada Q4 tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian konsultasi, konsinyasi, dan koordinasi teknis		Sampai dengan pelaporan ini telah dilakukan 3 kali kegiatan (konsultasi dan konsinyasi). Sebagai catatan kebutuhan konsultasi dan konsinyasi dokumen safeguard Provinsi Kalimantan Tengah telah selesai disusun.	



	yang intensif. Tahap awal dimulai pada 7 November 2025 di Palangka Raya melalui konsultasi identifikasi dan pemenuhan Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS) yang melibatkan 76 partisipan (44 laki-laki dan 32 perempuan) dari berbagai OPD dan unit teknis terkait. Pertemuan ini berhasil menyepakati rentang data yang dikumpulkan, yakni periode 2013 - 2023, serta pembentukan grup koordinasi lintas sektor untuk mempercepat verifikasi data. Proses tersebut dilanjutkan pada 14 November 2025 dengan fokus pada penyusunan dan pengelompokan data sesuai Prinsip 1 - 7 serta simulasi penginputan data ke dalam aplikasi SIS-REDD yang melibatkan 11 partisipan (5 laki-laki, 6 perempuan). Sebagai langkah krusial dalam pemenuhan data pendukung, tim yang terdiri dari Pokja REDD+ Kalteng, tenaga ahli, dan Yayasan Penabulu melaksanakan koordinasi lapangan dan inventarisasi data ke berbagai OPD serta NGO pada 22 - 24 Desember 2025 (8 partisipan (4 laki-laki, 4 perempuan)). Melalui pendistribusian surat permintaan data tahap II yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan ini berhasil mengamankan komitmen para pihak untuk melengkapi dokumen pendukung APPS. Hasil dari rangkaian aktivitas ini adalah terdokumentasikannya data safeguard secara sistematis dalam basis data digital, yang menjadi landasan utama bagi pelaporan dan implementasi kerangka pengaman sosial dan lingkungan REDD+ yang akuntabel di tingkat provinsi. Selain itu, pada kode kegiatan ini dilakukan untuk Honor expert safeguard REDD+.			
	4.2.5.4. Koordinasi daerah terkait penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+.	5 kali konsultasi daerah	Belum terlaksan	0%
	Masuk kedalam rencana kerja tahun 2024 - 2025 dengan target 3 kali konsultasi daerah, namun kegiatan belum dilakukan.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	4.2.5.5. Koordinasi dengan KLHK terkait penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+	5 kali konsultasi KLHK	Belum terlaksana	0%



	Kegiatan koordinasi dengan KLHK terkait penyusunan dan pelaksanaan safeguard REDD+ belum dilaksanakan oleh Pokja REDD+ Kalimantan Tengah karena hingga saat ini belum terdapat kesepakatan final mengenai bentuk/skema REDD+ yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah. Penentuan skema ini menjadi prasyarat utama, karena akan menentukan kerangka kerja, kebutuhan teknis, serta arah pengelolaan safeguard yang akan disusun dan dioperasionalkan. Selain itu, dokumen safeguard REDD+ tingkat provinsi belum dapat disusun secara lengkap karena substansi safeguard sangat bergantung pada skema yang dipilih, baik pendekatan yurisdiksi maupun skema berbasis Voluntary Carbon Market (VCM). Masing-masing skema memiliki konsekuensi berbeda terhadap standar, indikator, mekanisme pelaporan, serta pemenuhan prinsip-prinsip pengamanan sosial dan lingkungan. Tanpa kejelasan skema dan standar yang akan diacu, koordinasi formal dengan KLHK berisiko belum efektif karena belum ada materi dan kebutuhan teknis yang dapat dibahas secara terarah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pokja REDD+ Kalimantan Tengah memilih menunda koordinasi dengan KLHK hingga penentuan skema REDD+ dan standar safeguard yang akan digunakan disepakati. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan proses koordinasi berjalan lebih fokus, tepat sasaran, dan menghasilkan keluaran yang kuat, baik dalam penyusunan dokumen safeguard maupun dalam penyiapan mekanisme pelaksanaan dan pemantauannya di tingkat provinsi.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
	4.2.5.6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait input data Safeguards Kalteng ke SRN dan web SIS REDD+ Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait input data Safeguards Kalimantan Tengah ke SRN dan web SIS-REDD+ belum dilaksanakan secara khusus karena Pokja REDD+ Kalimantan Tengah baru menyelesaikan tahapan awal yang menjadi prasyaratnya, yaitu penyusunan Summary APPS Safeguard REDD+ Kalteng. Setelah tahapan tersebut selesai, proses input data pada web SIS-REDD+ Kementerian telah dilakukan pada akhir tahun 2025 (Desember) dan secara teknis telah mencapai tahap rekognisi capaian, dengan persentase capaian input sebesar 72%. Namun demikian, proses	3 dokumen laporan	Belum terlaksana	0%
			Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	



	penginputan masih berlanjut seiring dengan tersedianya dokumen pendukung safeguard yang terus diidentifikasi dan dihimpun. Pada tahap saat ini, fokus kerja tim masih berada pada pemenuhan substansi data dan kelengkapan bukti dukung yang diperlukan untuk memperkuat kualitas input. Tim bekerja secara simultan untuk mengidentifikasi, menelusuri, serta berupaya mendapatkan berbagai data, informasi, dan dokumen terkait safeguard yang tersebar di OPD dan para pihak. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan belum dapat dipisahkan sebagai agenda tersendiri, karena input dan penguatan eviden masih berlangsung secara dinamis dan belum mencapai titik stabil yang memadai untuk dievaluasi secara komprehensif. Dengan pertimbangan tersebut, Pokja REDD+ Kalimantan Tengah menunda pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hingga proses input data dan penghimpunan dokumen pendukung berada pada fase yang lebih matang dan mendekati lengkap. Penundaan ini dilakukan agar evaluasi dan pelaporan yang disusun nantinya tidak bersifat prematur, melainkan mampu menggambarkan capaian secara akurat, menilai kualitas input secara lebih obyektif, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan safeguard di Kalimantan Tengah.		
--	--	--	--



[Foto. Identifikasi dan pemenuhan Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS) program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 November 2025]

4.2.6. Inventarisasi emisi GRK di 5 sektor	Tersedianya 3 laporan inventarisasi emisi GRK, dengan milestones per sub kegiatan yaitu:	On Going	20%
Kegiatan inventarisasi emisi GRK di 5 sektor di Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan enam sub kegiatan, meliputi: Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor (4.2.6.1), Pengumpulan data inventarisasi GRK (4.2.6.2), Penyusunan laporan inventarisasi GRK (4.2.6.3), Kunjungan lapangan untuk Monitoring aksi mitigasi (4.2.6.4), Fasilitasi Verifikasi capaian aksi mitigasi (4.2.6.5), Pencatatan dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim, termasuk Input data laporan MRV di SRN dan/atau SIGN SMART (4.2.6.6). Dalam rencana kegiatan (proposal) keenam sub kegiatan ini masuk dalam perencanaan kegiatan tahun 2025. Berikut informasi terkait progress dari sub kegiatan tersebut.	a. 2 kali bimtek inventarisasi GRK b. 3 kali pengumpulan data IGRK c. 3 laporan IGRK d. 3 kali kunjungan monitoring aksi mitigasi e. 3 kali verifikasi aksi mitigasi f. 3 pencatatan dan pelaporan aksi mitigasi	Sampai dengan pelaporan ini telah disusun 1 laporan IGRK untuk pelaporan tahun 2024, 1 kali bimtek dan 1 kali pengumpulan data.	
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor		Tercapai	100%



	Bimbingan Teknis (Bimtek) Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di 5 Sektor bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat dalam metode inventarisasi GRK, mengoptimalkan penggunaan sistem digital untuk pengumpulan data, serta memperkuat kerja sama lintas sektor. Sektor-sektor yang menjadi fokus inventarisasi ini meliputi sektor Energi, Pertanian, Limbah, Kehutanan, dan Industri. Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh narasumber dari Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah serta Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan yang memaparkan teori dan regulasi teknis terkait inventarisasi. Implementasi kegiatan dilaksanakan secara bertahap pada bulan Februari 2025 dengan membagi wilayah menjadi dua zona untuk mengefisiensikan waktu koordinasi mengingat luasnya wilayah Kalimantan Tengah. Zona Barat dilaksanakan pada 11 - 14 Februari 2025 bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan Zona Timur diselenggarakan pada 24 - 27 Februari 2025 di Kabupaten Kapuas. Rangkaian Bimtek ini melibatkan total 67 partisipan yang terdiri dari perwakilan DLH dari 14 kabupaten/kota, dengan rincian partisipasi gender sebanyak 35 laki-laki dan 32 perempuan. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya target pemberian bimbingan teknis bagi para pemangku kepentingan sebagai langkah awal penyusunan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan lesson learned selama kegiatan, teridentifikasi bahwa keberhasilan penyusunan dokumen IGRK sangat bergantung pada pendampingan teknis dan komunikasi lintas sektor yang intensif. Sebagai tindak lanjut, saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan data inventarisasi di tingkat daerah serta penerusan koordinasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait di lima sektor tersebut.	2 kali bimtek iinventarisasi IGRK	Sampai dengan pelaporan ini, target keseluruhan usulan masih dalam proses. Dan untuk target tahun telah tercapai yaitu 1 bimtek IGRK.	
	4.2.6.2. Pengumpulan data inventarisasi GRK Kegiatan Pengumpulan Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) (Aktivitas 4.2.6.2) bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, terukur, dan terverifikasi mengenai sumber emisi serta serapan GRK sebagai fondasi penyusunan inventarisasi yang andal sesuai standar nasional. Pada Q4 2025, implementasi kegiatan ini difokuskan pada penvelenggaraan Rapat	3 kali pengumpulan data inventarisasi IGRK	On Going	35%
			Sampai dengan pelaporan ini dilakukan 1 kali kegiatan pengumpulan data IGRK	



	Verifikasi dan Kompilasi Database Pelaporan Inventarisasi Emisi GRK Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada 26 November 2025 di Palangka Raya. Pertemuan strategis ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan bersama dari APBD serta Proyek RBP REDD+ GCF Output 2. Kegiatan ini melibatkan 27 partisipan (19 laki-laki dan 8 perempuan) yang terdiri dari unsur dinas teknis dan tenaga ahli. Proses verifikasi dipandu oleh narasumber ahli dari Universitas Palangka Raya (Ir. Bismart Ferry Ibie, M.Si. dan Dr. Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc.). Hasil utama dari rangkaian aktivitas ini adalah berhasilnya verifikasi dan kompilasi database inventarisasi emisi GRK tahun 2025, sehingga data tersebut siap digunakan sebagai basis pelaporan daerah yang akurat dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan meneruskan proses komunikasi dan pengolahan data sektoral guna memastikan seluruh data inventarisasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi terdokumentasi dengan baik dalam sistem pelaporan nasional.			
	Sub Activity 4.2.6.3. Penyusunan laporan inventarisasi GRK	3 laporan inventarsisasi IGRK	On Going	35%
	Sudah disusun 1 laporan penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024		Sampai dengan pelaporan ini, telah disusun 1 laporan IGRK tahun 2024	
	4.2.6.4. Kunjungan lapangan untuk Monitoring aksi mitigasi	3 kali kunjungan monitoring aksi mitigasi	Belum terlaksana	0%
	Kegiatan kunjungan lapangan untuk monitoring aksi mitigasi belum dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah karena pada tahap awal pelaksanaan program, kegiatan ini belum memiliki padanan atau kegiatan serupa yang sudah berjalan secara rutin di dinas. Secara teknis, belum tersedianya mekanisme kerja, pembagian peran, serta format monitoring lapangan yang baku menyebabkan kegiatan tersebut belum masuk sebagai prioritas pelaksanaan sejak awal. Selain itu, fokus kerja DLH pada periode awal lebih banyak diarahkan pada penguatan aspek perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dasar pelaksanaan aksi mitigasi, seperti pengumpulan data, penyelarasan informasi antar bidang, serta penyiapan dokumen dan koordinasi internal. Dalam situasi ini, aktivitas kunjungan lapangan yang memerlukan dukungan logistik, jadwal lintas pihak, serta kesiapan instrumen		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	



	pemantauan belum dapat dijalankan secara efektif tanpa adanya kerangka pelaksanaan yang jelas. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, DLH Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan kunjungan lapangan sebagai agenda yang akan dilaksanakan setelah perangkat teknisnya lebih siap, termasuk penetapan indikator, metode monitoring, serta integrasi kegiatan dengan sistem kerja dinas. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika kunjungan lapangan dilaksanakan, kegiatan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan temuan lapangan yang terukur, dapat ditindaklanjuti, dan memperkuat pencapaian aksi mitigasi secara nyata.			
	4.2.6.5. Fasilitasi Verifikasi capaian aksi mitigasi Kegiatan fasilitasi verifikasi capaian aksi mitigasi belum dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah karena secara teknis kegiatan ini belum memiliki rujukan praktik yang sudah mapan dalam tata kerja dinas. Pada tahap awal, belum tersedia prosedur operasional, perangkat verifikasi, serta alur koordinasi yang jelas untuk memastikan proses verifikasi berjalan seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menyebabkan kegiatan verifikasi belum menjadi agenda yang siap dieksekusi sejak awal pelaksanaan. Selain itu, DLH masih memusatkan perhatian pada pemenuhan tahapan dasar yang mendukung verifikasi, seperti penguatan pengumpulan data, penelusuran bukti dukung, serta konsolidasi informasi capaian dari berbagai unit/OPD dan para pihak. Tanpa kelengkapan data dan eviden yang memadai, pelaksanaan verifikasi berisiko menghasilkan penilaian yang belum akurat atau sulit ditelusuri kembali, sehingga tidak optimal untuk mendukung pelaporan capaian mitigasi secara kredibel. Dengan pertimbangan tersebut, fasilitasi verifikasi capaian aksi mitigasi direncanakan untuk dilaksanakan setelah sistem pendukungnya lebih siap, termasuk penetapan indikator verifikasi, metode pemeriksaan lapangan/dokumen, serta pembagian peran antar pihak yang terlibat. Penundaan ini dilakukan agar verifikasi yang dilakukan nantinya benar-benar menghasilkan	3 kali verifikasi aksi mitigasi	Belum terlaksana	0%
			Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	



	pengesahan capaian yang kuat, konsisten, dan menjadi dasar yang kokoh bagi perbaikan pelaksanaan aksi mitigasi di Kalimantan Tengah.			
	4.2.6.6. Pencatatan dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim, termasuk Input data laporan MRV di SRN dan/atau SIGN SMART	3 kali pencatatan dan pelaporan aksi mitigasi	Belum terlaksana	0%
	Pencatatan dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim, termasuk input data laporan MRV ke SRN dan/atau SIGN SMART, pada dasarnya sudah mulai dilakukan secara teknis. Namun, pelaksanaannya masih berada pada tahap awal dan lebih bersifat pemenuhan langkah-langkah dasar (input awal, uji alur kerja, dan penyesuaian format) sehingga belum dapat disebut sebagai kegiatan yang berjalan penuh, rutin, dan terlembagakan. Karena itulah, dalam penilaian capaian kegiatan ini kerap terbaca “belum dilakukan” dalam arti belum dilaksanakan secara utuh sesuai standar proses pencatatan–pelaporan MRV yang lengkap dan berkelanjutan. Secara substansi, MRV menuntut data yang konsisten, dapat ditelusuri (<i>traceable</i>), serta didukung eviden yang memadai—mulai dari definisi aksi mitigasi, batasan kegiatan, metode perhitungan, hingga kelengkapan dokumen pendukung. Pada praktiknya, tim masih bekerja mengonsolidasikan informasi dari berbagai sumber dan OPD/para pihak, termasuk menyelaraskan satuan data, periode pelaporan, serta kualitas bukti dukung. Selama proses konsolidasi dan pengendalian mutu data ini masih berjalan, pencatatan dan pelaporan belum dapat dipastikan stabil sebagai sebuah siklus MRV yang rapi, karena input berisiko menjadi parsial atau berubah seiring perbaikan data dan dokumen. Dengan demikian, yang tertunda bukan “input”-nya semata, melainkan penguatan tata kelola pencatatan dan pelaporan agar menjadi mekanisme yang baku dan berkelanjutan: penetapan peran dan penanggung jawab, SOP/alur verifikasi internal, jadwal pelaporan, serta penguatan kapasitas operator sistem. Setelah perangkat tersebut lebih mapan dan ketersediaan data dari para pihak semakin lengkap, kegiatan pencatatan–pelaporan (termasuk input MRV ke SRN/SIGN SMART) dapat dijalankan secara lebih konsisten, akurat, dan kredibel sebagai dasar evaluasi capaian mitigasi Kalimantan Tengah.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	



[Foto. Rapat verifikasi dan kompilasi database pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (IGRK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025]

4.3. Terbangunnya kampung iklim yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	4.3.1. Sosialisasi program Kampung Iklim	Terlaksananya 28 kali sosialisasi pada 14 kab/kota	On Going	60%
	Sosialisasi Program Kampung Iklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat serta pemangku kepentingan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025, pada Q1 2025 dilakukan melalui dua rangkaian kegiatan sosialisasi yang dipusatkan di Palangka Raya. Pemusatan ini dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan tingkat tapak, yang awalnya dilakukan dimasing-masing kab/kota, untuk tahap awal ini dilakukan secara bersamaan (2 rangkaian) dengan mengundang 14 perwakilan kab/kota secara langsung di Kota Palangka Raya. Sosialisasi awal dilaksanakan di satu lokasi dengan mengundang perwakilan dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Rangkaian pertama dilaksanakan pada 13 - 14 Maret 2025 dan diikuti oleh perwakilan dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas,		Sampai dengan pelaporan ini, target masih dalam proses, berupa 17 kali atau kab/kota dilakukan/mendapatkan sosialisasi program kampung iklim.	



	dan Kabupaten Seruyan. Rangkaian kedua dilaksanakan pada 20 - 21 Maret 2025 dengan peserta dari Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Murung Raya. Tahap awal kegiatan ini melibatkan sebanyak 146 peserta, terdiri atas 109 laki-laki dan 37 perempuan, yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 14 kabupaten/kota serta kelompok masyarakat dampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait indikator capaian status Program Kampung Iklim (ProKlim). Memasuki Q2 2025, sosialisasi dilaksanakan pada 7 Mei 2025 di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan 39 partisipan (27 laki laki 12 perempuan), termasuk menghadirkan narasumber dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) guna memperkuat pemahaman terkait regulasi dan manfaat program bagi desa. Pada Q3 2025, tepatnya 25 September 2025, kegiatan difokuskan di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, yang melibatkan 69 (34 laki-laki, 25 perempuan) perwakilan masyarakat, media, dan mitra pembangunan dengan penekanan pada inovasi pengolahan sampah dan ekonomi sirkular melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Rangkaian kegiatan tahun 2025 diakhiri pada Q4 2025 dengan menysasar generasi muda di Kabupaten Kapuas pada 16 Oktober 2025. Sosialisasi ini melibatkan 50 siswa SMA dan pemuda (16 laki-laki dan 34 perempuan) untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai aksi nyata mitigasi seperti penghematan energi dan penghijauan. Hasil dari keseluruhan rangkaian ini adalah teridentifikasinya berbagai masukan strategis terkait kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan kolaborasi lintas sektor yang diharapkan dapat mendukung target verifikasi 15 lokasi Kampung Iklim oleh KLHK di masa mendatang.		
--	---	--	--



[Foto. Sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Kabupaten Kapuas tanggal 16 Oktober 2025 yang diikuti oleh siswa SMA/SMK/Pemuda yang memiliki minat atau terlibat dalam kegiatan lingkungan di Kabupaten Kapuas]

4.3.2. Fasilitas Penyusunan Peta Jalan Program Kampung Iklim	Tersedianya 15 peta Jalan Kampung Iklim	Belum terlaksana	0%
Fasilitas penyusunan peta jalan program kampung iklim ini masuk dalam rencana kerja tahun 2024-2025, namun dalam implementasinya belum dilaksanakan.		Sampai dengan pelaporan ini, capaian kegiatan belum tercapai.	
4.3.3. Dukungan pembangunan model kampung iklim	Terbangunnya 15 model kampung iklim, dengan milestone per sub kegiatan yaitu:	On Going	30%
Kegiatan dukungan model kampung iklim dicapai dengan 3 sub aktivitas, meliputi peningkatan kapasitas kampung iklim (4.3.3.1), bantuan sarana/prasarana bagi kampung iklim (4.3.3.2), serta fasilitas verifikasi kampung iklim (4.3.3.3). Dari ketiga sub aktivitas ini, hanya peningkatan kapasitas (4.3.3.1) yang masuk dalam rencana kerja proposal tahun 2024 - 2025. Dan dalam implementasinya sub kegiatan peningkatan kapasitas kelompok kampung iklim telah dilakukan. Selain itu, telah dilakukan pertemuan awal untuk mendukung proses sub kegiatan bantuan sarana prasarana bagi	a. 1 kali kegiatan studibanding b. 15 paket dukungan sarana prasarana PROKLIM b. 15 kali fasilitasi/verifikasi Proklim	Capaian dari target kegiatan, telah terlaksana peningkatan kapasitas berupa 1 kali studi banding, dan 1 kali penguatan/pelatihan kampung iklim. Dan 3 kali pertemuan/rapat persiapan dukungan sapras kampung iklim.	



	kampung iklim. Berikut detail informasi dari sub kegiatan tersebut.			
	4.3.3.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	1 kali kegiatan studi banding	Tercapai	100%
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kampung Iklim ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan memberikan referensi praktik terbaik dari wilayah lain guna memperkuat implementasi program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak. Implementasi kegiatan ini dilakukan melalui dua kali kegiatan sepanjang tahun 2025. Tahap pertama dilaksanakan pada 14 - 16 Januari 2025 berupa studi banding ke Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang melibatkan 22 peserta (17 laki-laki dan 5 perempuan) terdiri dari perwakilan DLH Provinsi, Yayasan Penabulu, serta utusan dari 15 lokasi Kampung Iklim di Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, peserta mempelajari keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Bakhti, tata kelola air bersih di Desa Panji, pengembangan komoditas kopi di Desa Wanagiri, serta standar kebersihan lingkungan di Desa Penglipuran. Hasil studi ini kemudian dipertajam melalui FGD pada 18 Januari 2025 di Palangka Raya untuk menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) bagi masing-masing desa dampingan. Tahap kedua difokuskan pada penguatan inovasi lokal yang dilaksanakan pada 4 November 2025 di Kelurahan Kalampangan. Kegiatan ini berupa pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi tas belanja ramah lingkungan sebagai upaya mendorong ekonomi sirkular melalui prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>). Pelatihan ini melibatkan 65 partisipan (34 laki laki, 31 perempuan) yang terdiri dari unsur masyarakat, PKK, media, dan mitra pembangunan guna menjawab tantangan meningkatnya timbunan sampah plastik di Kalimantan Tengah sekaligus mendukung target Zero Waste 2030. Secara keseluruhan, rangkaian aktivitas ini berhasil meningkatkan keterampilan teknis masyarakat dalam mengelola limbah dan sumber daya lokal secara berkelanjutan, yang diharapkan dapat menaikkan level kategori ProKlim di wilayah masing-masing.		Sampai dengan pelaporan ini, target telah tercapai berupa 1 kali studi banding, dengan tambahan penguatan berupa 1 kali pelatihan kelompok kampung iklim.	
	4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim	15 paket dukungan model proklm	On Going	20%
	Kegiatan bantuan sarana dan prasarana ini, jika ditinjau dari rencana kerja dalam proposal/annual plan, termasuk dalam jadwal		Sampai dengan pelaporan ini, target belum tercapai berupa 15 paket dukungan kampung	



	rencana pelaksanaan tahun 2026. Namun pada tahun 2025 beberapa pertemuan awal dilakukan/serangkaian tahapan persiapan telah dilaksanakan lebih awal. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi rencana pemberian bantuan pada 31 Januari 2025 di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah dan melalui media daring. Tahapan berlanjut pada 17 Februari 2025 melalui verifikasi proposal usulan dari kelompok masyarakat, yang kemudian disusul dengan rapat penetapan bentuk dukungan pada 18 Februari 2025 bersama tim RBP-Penabulu. Hasil dari proses koordinasi ini menetapkan bahwa bantuan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pengelolaan sampah di masing-masing lokasi sasaran guna meningkatkan resiliensi lingkungan desa. Secara keseluruhan, aktivitas ini melibatkan 33 partisipan (27 laki-laki dan 6 perempuan) yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga perantara, dan perwakilan kelompok penerima manfaat. Hingga akhir periode pelaporan awal, target pemberian 15 paket sarana dan prasarana telah mencapai tahap finalisasi administrasi dan verifikasi teknis untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Sebagai langkah tindak lanjut, akan dilakukan penyiapan dokumen perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani setelah bentuk dan jenis barang bantuan dipastikan terpenuhi bagi desa-desa prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Timur, Murung Raya, dan Katingan.		iklim, namun baru dilakukan 3 kali pertemuan/rapat persiapan.
--	--	--	--



[Foto. Pembinaan dan pelatihan dengan kampung iklim terkait pengolahan tas belanja dari sampah plastik di Kelurahan Kalampangan tanggal 4 November 2025]

4.3.4. Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	Terlaksananya 15 pemantauan kampung iklim	On Going	20%
Pemantauan dan monitoring program kampung iklim telah dilaksanakan pada Q1 dan Q3 tahun 2025. Berikut detail kegiatan yang telah dilakukan.		Pemantauan program kampung iklim masih/akan dilakukan untuk mencapai target sub kegiatan yang telah direncanakan.	
4.3.4.1. Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	12 kali monev Proklim di 15 kampung iklim	On Going	20%
Pemantauan dan Monitoring Program Kampung Iklim dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan serta efektivitas aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dijalankan oleh masyarakat di lokasi ProKlim. Implementasi kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada 19 - 26 Maret 2025 (Q1 2025) melalui pengumpulan data oleh 19 enumerator dan 22 pendamping di berbagai wilayah di Kab. Barito Timur (Desa Bamban, Desa Jaar, Desa Lagon, Desa Sumber Rejo, Desa Tewah Pupah), Kab. Barito Utara (Kel. Jingah), Kab. Murung Raya (Desa Olung Nongo, Olung Siron), Kab. Pulang Pisau (Kel. Pulau Pisau), Kota Palangka Raya (Kel. Bukit		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 2 kali priode monev Proklim di 11 Kab/Kota yang meliputi 30 lokasi desa/kelurahan.	



	Tunggal, Kel. Langkai, Kel Menteng, Kel Bukit Tunggal), Kab. Kapuas (Desa Bakungin, Desa Sei Asam), Kab. Lamandau (Desa Bukit Indah, Desa Nanga Bulik, Desa Kujan) dengan total 18 lokasi desa/kelurahan. Pemantauan berlanjut secara lebih intensif pada rentang waktu bulan Juni - Juli 2025 (Q3 2025) melalui kunjungan lapangan dan wawancara langsung di 16 desa yang tersebar di 8 kabupaten, yaitu Pulau Pisau, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Kapuas, Barito Timur, dan Barito Selatan. Hasil dari rangkaian pemantauan ini menunjukkan adanya capaian signifikan di tingkat tapak, di mana ditemukan berbagai aksi nyata masyarakat seperti pengendalian air untuk mengatasi kekeringan, inisiatif ketahanan pangan melalui diversifikasi tanaman, serta pengelolaan sampah mandiri, sebagaimana teridentifikasi di Desa Mentaren I. Ditemukan catatan penting terkait kendala teknis dalam pelaporan data ke Sistem Registri Nasional (SRN). Berdasarkan <i>lesson learned</i> selama kegiatan, teridentifikasi bahwa data pada SRN belum terisi lengkap karena keterbatasan pemahaman enumerator dalam mengisi format data adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan. Sebagai tindak lanjut strategis, diperlukan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi enumerator di setiap kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas pelaporan dan memastikan seluruh aksi mitigasi di Kalimantan Tengah terdata dengan akurat dalam sistem nasional.		
--	--	--	--



[Foto. Monitoring dan evaluasi Proklam di Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan. Terdapat kebun toga yang merupakan milik Tim Penggerak PKK Desa Kalahien]

	Monitoring dan Evaluasi Program	12 kali monitoring program, 12 kali monitoring safeguard, 1 kali midterm, 1 kali final evaluasi	On Going	20%
	Rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program pendukung RBP REDD+ GCF Output 2 di Kalimantan Tengah dimulai pada 6 – 8 November 2024 dengan koordinasi dan konsolidasi rencana pelaksanaan bersama tim Penabulu di Palangka Raya. Memasuki awal tahun 2025, monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi teknis tim RBP lintas provinsi (Kalteng, Lampung, dan Jambi) pada 7 – 11 Januari 2025, yang mencakup penyusunan laporan pada 8 – 9 Januari 2025 serta diskusi intensif bersama BPD LH pada 10 Januari 2025. Persiapan tingkat tapak dipantau melalui pertemuan dengan DLH Kalteng pada 19 – 20 Januari 2025, diikuti dengan konsultasi perkembangan program di Jakarta bersama KLH pada 9 – 10 Maret 2025 dan pelaksanaan Monev Safeguard pada 19 – 21 Maret 2025. Evaluasi kinerja tiap kuartal dijalankan secara konsisten, mulai dari evaluasi Q1 di Palangka Raya pada 14 – 18 April 2025, koordinasi nasional di Jakarta pada 2 – 5 Juni 2025, hingga penyiapan laporan Triwulan II di Sentul pada 24 – 27 Juni 2025. Memasuki paruh kedua tahun		Sampai dengan pelaporan ini, telah dilakukan 5 kali periode monev (Q4 2024, Q1- Q4 2025).	



	2025, fokus bergeser pada pembahasan rencana kerja untuk optimalisasi waktu pada 16 Juli 2025, serta konsolidasi persiapan pelaksanaan pada 24 – 27 September 2025 guna menyatukan pemahaman tim mengenai alur keuangan (Quill) dan pelaporan. Pada akhir tahun 2025, aktivitas diperkuat melalui konsinyering capaian bersama BPDH dan KLHK di Jakarta pada 9 – 11 Oktober 2025 serta koordinasi program dan keuangan di Palangka Raya pada 15 – 16 Oktober 2025. Supervisi konsolidasi keuangan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 3 – 5 November 2025 dan berlanjut dari 6 November hingga 5 Desember 2025 guna penguatan sistem pengarsipan. Rangkaian monev ini diakhiri dengan konsolidasi kelembagaan Pokja REDD+ pada 8 – 15 November 2025 (termasuk FGD rencana kerja pada 13 – 15 November 2025) dan ditutup dengan proses identifikasi serta verifikasi laporan (MoV) secara langsung oleh tim nasional pada 26 November – 12 Desember 2025.		
	 Monitoring Penyusunan Laporan & Rencana SMT II RBP GCF Output II Kalteng -2°12'58", 113°54'33", 45,7m, 10° 15 Apr 2025 17.45.23 [Foto. Monitoring penyusunan laporan dan rencana semester II RBP GCF output 2 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 April 2025]		

* **Output dan kegiatan** yang dilaporkan dalam tabel harus selaras dengan kegiatan yang disampaikan dalam kerangka kerja logis (logical framework) dan jadwal pelaksanaan proyek. **Status kemajuan** meliputi: kegiatan



belum jatuh tempo, kegiatan dimulai-lebih cepat dari jadwal, kegiatan dimulai-progress sesuai rencana, kegiatan dimulai-tetapi progress tertunda, kegiatan tertunda. Kemajuan implementasi secara kumulatif per periodik pelaporan.

Perkembangan terbaru mengenai indikator dampak berdasarkan *logical framework*

Outcome	Indikator Outcome	Baseline	Means of Verification (MoV)	Capaian saat ini	Target (Mid-term)	Target (Final)
Outcome 1. Mendukung Percepatan Pencapaian Target Emisi GRK	Bertambahnya tutupan lahan seluas 1.000 Ha	Pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 reforestasi di Provinsi Kalimantan Tengah seluas sekitar 299.680 hektar atau seluas sekitar 74.920 hektar pertahun.	Peta tutupan hutan dan lahan, Laporan Proyek Tahunan	Telah disusun 40 rantek RHL mineral dan gambut, dan penguatan 40 kelompok kerja RHL mineral dan gambut.	500 Ha	1000 Ha
Outcome 2. Menguatnya Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Peningkatan Tata Kelola Kehutanan	Sebesar 4.685.135 Ha (4.105.022 Ha luas Kelola KPH dan 58.113 Ha Kelola TAHURA) (Tahura) terkelola secara lestari dan berkelanjutan	Dokumen rencana pengelolaan hutan tingkat tapak	4.685.135 Ha (4.105.022 Ha luas Kelola KPH dan 58.113 Ha Kelola TAHURA)	1 draf dokumen pengelolaan Tahura IMSB telah dibahas/disusun	0	4.685.135 Ha (4.105.022 Ha luas Kelola KPH dan 58.113 Ha Kelola TAHURA dikelola secara lestari)
Outcome 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan	350 orang mendapatkan akses dan manfaat dari pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari	Berita acara pembentukan KUPS, RKPS Dokumentasi kegiatan	604 KUPS terbentuk di Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan pada outcome ini belum terlaksana	150 orang tergabung ke dalam 10 KUPS 200 orang tergabung dalam 10 KPS	350 orang mendapatkan akses dan manfaat dari pemanfaatan sumberdaya hutan lestari
Outcome 4. Menguatnya Kebijakan dan kelembagaan Implementasi REDD+ dan NDC	Tersedianya 6 dokumen kebijakan yang terdiri dari Dokumen FREL/FRL, rencana strategis dan aksi REDD+, MRV, Benefit Sharing Plan, safeguard REDD+ level daerah di Provinsi	Dokumen FREL/FRL, rencana strategis dan aksi REDD+, MRV, Benefit Sharing Plan, safeguard REDD+, laporan akhir kegiatan, dokumentasi	1 POKJA REDD tersedia	1 Pokja REDD+ Kalteng telah direvitalisasi, 1 dokumen Rencana Aksi, 1 dokumen FREL/FRL, 1 dan 1 dokumen safeguard telah disusun.	4 dokumen kebijakan (rencana strategis dan aksi REDD+, FREL/FRL, safeguard REDD+, IGRK)	6 dokumen kebijakan (rencana strategis dan aksi REDD+, FREL/FRL, safeguard REDD+, MRV, BSP, IGRK)



	Kalimantan Tengah					
--	-------------------	--	--	--	--	--

**Sesuai dengan indikator dan target yang telah disetujui dalam proposal pendanaan. Berikan informasi kemajuan yang relevan*

2.3. Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik

Pelaksanaan Proyek RBP GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dan telah memberikan pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola, perencanaan, dan sinergi multipihak ke depannya. Berikut tantangan dan Pelajaran yang dapat dipetik untuk pelaksanaan tahun pertama:

Jenis	Tantangan Yang Dihadapi	Status Kondisi	Tindakan Yang Diambil	Dampak Terhadap Implementasi	Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dan Keterangan Lainnya
Program/ kegiatan	Sejak awal perencanaan yang ada di dalam proposal, Provinsi Kalimantan Tengah tidak menetapkan lokus kegiatan ditingkat tapak secara detail seperti pada kegiatan RHL (40 lokasi), penguatan MPA (20 MPA), 15 kampung iklim, sehingga proses ini memakan waktu yang cukup Panjang dan ada proses skala prioritas dan persetujuan.	Sedang	Mengikuti arahan dan instruksi dari OPD dan mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan.	Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Tidak hanya itu, kondisi ini berpengaruh pada serapan anggaran (anggaran semester) yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pada kegiatan diakhir tahun 2025.	Penentuan lokus menjadi poin utama, sehingga tidak memakan waktu dan langsung pada tahap eksekusi. Penentuan lokasi ini juga butuh waktu dan persetujuan serta komitmen para pihak.
Program/ kegiatan	Sinkronisasi dan penjadwalan kegiatan seperti kegiatan penyusunan profil Kehati dan dokumen RIP, yang ternyata pada saat perencanaan dan dimulainya kegiatan, terjadi gap informasi terkait target, data awal menyebutkan 15 belum disusun, namun setelah berjalan terdapat beberapa yang telah disusun dan hanya akan dilakukan review.	Kecil	Penyesuaian kegiatan yang telah direncanakan	Penyesuaian bentuk metode yang semula berbentuk fasilitasi penyusunan dokumen secara penuh bertambah dengan ada yang hanya proses review.	Informasi awal yang terbaru menjadi hal yang penting sebelum dimulainya kegiatan.
Program/ kegiatan	Kegiatan proyek dimulai pada akhir tahun 2024, Dimana hampir semua pelaksana/OPD fokus pada penyelesaian	Sedang	Penyesuaian kegiatan yang telah direncanakan	Beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan pada awal proyek tidak dapat terlaksana.	Pengaturan dan penjadwalan kegiatan harus melihat dinamika OPD ditingkat provinsi,



	kegiatan dan pelaporan (APBD).				terutama pada akhir tahun fiskal.
Safeguard REDD+	Provinsi Kalimantan Tengah belum pernah membuat laporan safeguard dan mengisi SIS REDD, yang merupakan mandatori untuk semua provinsi di Indonesia.	Sedang	Melakukan proses penguatan pemahaman dan penyiapan tim sefaguard di tingkat provinsi, serta pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan.	Kegiatan yang telah dilaksana khususnya pada intervensi safeguard REDD+ lebih membutuhkan waktu.	Pemahaman tentang safeguard sebagai komponen penting yang setara dengan kegiatan aksi.
Implemntasi Safeguard Proyek	Masih lemahnya pemahaman pelaksana/OPD bawah safeguard menjadi bagian rangkaian kegiatan dalam proyek.	Kecil	Mendampingi dan mengingatkan pelaksana/OPD dalam penerapan safeguard proyek.	Dampak terkait pemahaman ini tidak signifikan, mengingat proses intervensi dari Lemtara telah dilakukan seperti mendampingi dan mengingatkan kebutuhan kewajiban safeguard proyek.	Perlu melakukan integrasi antara safeguard proyek ke dalam kegiatan- kegiatan OPD pelaksana.
Kuangan	Ketaatan dan kepatuhan OPD pelaksana terkait SOP keuangan dan standar administrasi yang telah ditentukan masih ada yang belum sesuai, seperti pertanggung jawaban transportasi (nilai yang tidak sesuai dengan PMK dan bukti pertanggung jawaban).	Sedang	Menegakkan prosedur dan mengingatkan OPD terkait standar yang digunakan.	Keterlambatan (revisi) dalam proses pertanggung jawaban keuangan dari OPD pelaksana.	Adanya dinamika keuangan ini, dibutuhkan proses pengawalan dan ketelitian dari proses pertanggung jawaban. Dan pada tingkatan OPD, dibutuhkan PIC khusus yang bertanggung jawab terkait administrasi dan keuangan.
Kuangan	Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang cenderung "mendadak" sehingga proses penyiapan administrasi cenderung terburu buru dan sebagian kegiatan menggunakan mekanisme reimburse.	Sedang	Tetap memproses kegiatan dan mengawal proses pertanggung jawaban laporan keuangan		

3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender

Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPD LH. Sepanjang periode Oktober 2024 –Desember 2025,



pelaksanaan program difokuskan pada penguatan arsitektur REDD+, persiapan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPD LH.

Implementasi safeguard pada penguatan kepatuhan hukum (ISP 1), Pelaksana telah menerbitkan beberapa dokumen persyaratan ataupun legalitas yang harus dipenuhi, misalnya berbagai SK kelembagaan, legalitas kelompok dan lokasi, pelaksanaan PADIATAPA/FPIC untuk kegiatan RHL, penyusunan 20 dokumen Rancangan Teknis RHL (500 ha lahan mineral dan 500 ha lahan gambut), serta penyusunan proposal RHL oleh kelompok dampingan. Program juga memastikan tata kelola ketenagakerjaan dan K3 (ISP 2) melalui penerapan SOP patroli, penggunaan APD, serta komitmen non-diskriminasi dalam rekrutmen dan pengadaan. Tidak ditemukan laporan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak pada periode pelaporan.

Pada aspek lingkungan (ISP 3 dan ISP 6), program telah menerapkan manajemen limbah kegiatan, menyusun 11 Profil Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi, memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (sebagian masih dalam proses), serta memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan untuk mencegah perburuan, penebangan, dan kebakaran hutan. Inventarisasi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah serta penyusunan RPPEG menjadi dasar pengelolaan berbasis konservasi dan mitigasi risiko ekologis.

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh Masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 1.442 perempuan dari total 4.191 peserta (34,4%). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen teknis, serta kegiatan ProKlim. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh ToR rekrutmen dan pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik, FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap komitmen BPD LH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi limbah, penyelesaian dokumen kehati yang masih berproses, serta peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026.

Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana dan penerima manfaat, pimpinan rapat koordinasi, tuan rumah kegiatan sosialisasi/Bimtek.
	KPH dibawah lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan	Pelaksana lapangan, koordinator kegiatan RHL dan pendamping PS di wilayah kerja.



Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kelompok Pengelola Persetujuan PS di Wilayah KPHP: Koperasi Harapan Abadi – Desa Pantai Harapan Kelompok Tani (Poktan) Eka Hapakat – Desa Keruing Poktan Hatantiring – Desa Keruing Poktan Bersama Mandiri – Desa Pundu Poktan Mitra Usaha – Desa Selucing KTH Jirak Sepakat Jaya – Desa Bukit Batu KTH Djapang Harapan Baru – Desa Biru Maju KTH Tani Maju – Desa Karang Sari Poktan Harapan Abadi – Desa Pantai Harapan	Pemegang ijin, pelaksana dan penerima manfaat
	BPSKL Wilayah Kalimantan	Narasumber dalam Bimtek dan pendamping kebijakan Perhutanan Sosial.
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan, koordinator teknis
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Mitra teknis dan penyedia data/perspektif lingkungan.
	KPHL Kapuas – Kahayan	House kegiatan, pelaksana teknis tapak, informan lapangan.
	Kelompok Pengelola Izin Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Kapuas–Kahayan	Partisipan kegiatan, informan pengelolaan kawasan, penerima manfaat program.
1.2.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator isu lingkungan, penyedia data, dan fasilitator kebijakan provinsi.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah	Sinkronisasi perencanaan program, penguatan kebijakan, dan integrasi ke dokumen perencanaan daerah.
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (Gunung Mas, Barito Selatan)	Pelaksana teknis di kabupaten, penyedia data lapangan, dan verifikasi kondisi lingkungan.
	BAPPERIDA Kabupate (Gunung Mas, Barito Selatan)	Penyelarasan rencana program dengan rencana pembangunan kabupaten serta dukungan koordinasi lintas sektor.
	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberian rekomendasi teknis.
	Perwakilan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	Pelaksana teknis di tingkat tapak, informan kondisi kawasan, dan fasilitator implementasi program
2.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan Prasarana (papan himbauan dll)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penerima manfaat, penanggung jawab program, dan pelaksana utama kegiatan patroli pengamanan hutan di tingkat provinsi.
	KPHP Kahayan Hulu	Pelaksana patroli dan penyedia laporan teknis pengamanan hutan.
	KPHL Kapuas Kahayan	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.



	KPHL Gerbang Barito	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
	KPHP Barito Hilir	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api	Pemerintah dan masyarakat desa Katimpun, Desa Katunjung, Desa Mantangai Hulu, Desa Petak Puti, Desa Tambak Bajai, Desa Terusan Raya	Penerima manfaat dan pelaksana utama kegiatan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penerima manfaat, penanggung jawab program, dan pelaksana utama kegiatan
2.1.2.2. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai instansi teknis yang mendukung pemantauan dan mitigasi risiko kebakaran.
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai pelaksana utama patroli dan penanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi.
	Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK)	Sebagai tim respons cepat di tingkat kelurahan untuk melakukan deteksi dini dan penanganan awal karhutla
	Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Sebagai unsur keamanan yang membantu pengawasan lapangan, sosialisasi pencegahan, dan dukungan mitigasi risiko kebakaran
2.2.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ((Bidang TAHURA, Bidang PSDA)	
	WWF Kalteng	Turut mendukung berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Dishut Kalteng untuk penguatan TAHURA
	Masyarakat Wilayah Desa Paduran Sebangau	Masyarakat terdampak/terlibat dalam survei dan penyusunan rencana pengelolaan
	KPHL/KPHP se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta Bimtek penyusunan RPHJP
	Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL)	Peserta dan pendukung teknis RPHJP
	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Pendukung teknis penyusunan RPHJP
	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Narasumber Bimtek terkait penyusunan dan penilaian RPHJP
	Ditjen Kementerian Kehutanan	Narasumber Bimtek terkait penyusunan dan penilaian RPHJP
4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan kontributor penyusunan mekanisme kerja Pokja REDD+
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan penanggung jawab teknis pembahasan format SK dan personalia sekretariat Pokja REDD+



	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan pemberi masukan perencanaan regional terkait fungsi Pokja REDD+
4.1.2.1. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementasi REDD+	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	House, penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK	Narasumber teknis untuk penyusunan rencana kerja POKJA REDD+
	Mitra pembangunan dan organisasi masyarakat (Fakultas Kehutanan Universitas Palangka Raya (unsur akademisi), Yayasan Penabulu, WWF Indonesia, Yayasan Tambuhak Sinta, GGI dan GIZ)	Peserta dan kontributor
	POKJA REDD+ Kalteng	House, penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
	Bappedalitbang	Peserta kegiatan, Penyelarasan rencana program dengan rencana pembangunan serta dukungan koordinasi lintas sektor.
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan pelaksanaan Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk pembelajaran FCP	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Narasumber kegiatan
	Pokja REDD+ Kalimantan Barat	Narasumber kegiatan
	Yayasan Penabulu	Peserta kegiatan
	Yayasan Bentang	Narasumber kegiatan
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah	pedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta diskusi dan pelaksana rapat awal penyusunan arsitektur REDD+
	Balai PPI Kalimantan	Peserta rapat dan kontributor teknis penyusunan rancangan kegiatan Pokja REDD+
	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta rapat dan pemberi masukan perencanaan lintas sektor
	Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta rapat dan kontributor aspek pemberdayaan masyarakat
	PPIB Universitas Palangka Raya	Peserta rapat dan penyedia masukan akademis
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	OPD terkait, peserta rapat dan kontributor penyusunan arsitektur REDD+
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	OPD terkait, peserta rapat dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Konsultan	Peserta diskusi dan penyedia dukungan teknis penyusunan rancangan kegiatan



	Praktisi	Peserta diskusi dan penyedia pandangan teknis lapangan
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana rapat awal persiapan penyusunan arsitektur REDD+
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / KLHK	Penyusun dokumen SIS-REDD+ kedua dan penyedia kerangka acuan arsitektur REDD+ sesuai Cancun Agreement
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana aksi implementasi REDD+
	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) – KLHK	Narasumber teknis terkait strategi, arsitektur REDD+, dan penyesuaian kebijakan nasional–provinsi
	BPD LH	Narasumber teknis terkait pendanaan, safeguard, dan implementasi program RBP REDD+
	Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor dalam pembahasan rencana aksi implementasi REDD+
4.2.1.2. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan FREL/FRL	Direktorat IGRK KLHK	Narasumber: Pengembangan FREL dan pengukuran kinerja REDD+
	Universitas Kyoto	Narasumber: Cetak biru FREL Provinsi Kalimantan Tengah
	Universitas Palangka Raya	Narasumber: Struktur FRL dan sistematika perhitungan
	Universitas Palangka Raya	Narasumber: Isu deforestasi dan degradasi hutan
		Narasumber: Diskursus kebakaran hutan dan lahan di Kalteng
	Praktisi	Narasumber: Penyampaian data dasar dalam penyusunan FRL
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan koordinator kegiatan konsultasi teknis
		Peserta dan kontributor akademis
	Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis provinsi
	Perwakilan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan pendukung teknis implementasi REDD+
	Perwakilan KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyampai informasi kondisi tapak
	Perwakilan Mitra Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan mitra pendukung penguatan teknis REDD+
	Praktisi/Pakar REDD+	Peserta dan pemberi masukan teknis ahli
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan	Tim Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor utama dalam pembahasan teknis REDD+ provinsi



Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	Ketua Pokja IGRK & MRV – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber teknis dan pemberi arahan terkait IGRK, MRV, dan sinkronisasi kebijakan nasional–provinsi
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	APPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan dan koordinator penyelarasan perencanaan program
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis sektor kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor isu penggunaan lahan dan komoditas perkebunan
	KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan informan kondisi pengelolaan hutan di tingkat tapak
	Akademisi – Universitas Palangka Raya	Peserta dan kontributor kajian ilmiah REDD+
	Mitra Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan pendukung teknis implementasi program REDD+
4.2.3.1. Persiapan Penyusunan MR	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Peserta dan koordinator penyelarasan perencanaan daerah
	Akademisi – Universitas Palangka Raya	Peserta dan kontributor ilmiah dalam pembahasan MRV dan REDD+
	Praktisi dan Pakar MRV Nasional	Narasumber teknis dan penyedia masukan ahli MRV
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan FGD
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan dan penyedia masukan perencanaan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan dan kontributor teknis sektor kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh	Narasumber berbagi pengalaman implementasi safeguard REDD+
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber teknis penyusunan dan harmonisasi kebijakan safeguard
	Pokja REDD Kalten	Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan FGD
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor	inas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Host dan pelaksana kegiatan Bimtek
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan Bimtek dan penerima manfaat teknis inventarisasi GRK



	Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan	Narasumber teknis dalam inventarisasi GRK 5 sektor
4.3.1.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tuan rumah dan pelaksana kegiatan sosialisasi
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penerima informasi teknis ProKlim
	Kelompok Masyarakat/Kelompok Kampung Iklim	Peserta dan penerima manfaat sosialisasi
	Desa-Desa ProKlim di Kabupaten Kotawaringin Barat	Peserta dan lokasi sasaran sosialisasi
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Peserta dan pendukung teknis di tingkat kabupaten
	Tim Pelaksana D2inas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana lapangan dan fasilitator sosialisasi
	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (KLHK)	Narasumber teknis Program Kampung Iklim
4.3.3.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan sekaligus peserta studi banding
	Perwakilan Desa/Kelompok Kampung Iklim Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta studi banding dan penerima pembelajaran
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Narasumber dan penyedia informasi praktik baik ProKlim
	Desa/Kelompok Kampung Iklim dampingan DLH Kabupaten Buleleng	Narasumber dan lokasi pembelajaran lapangan
4.3.4.1. Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Pov Kalteng	Pelaksanaan monitoring

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan Proyek RBP GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2024–2025 pada prinsipnya berjalan dengan baik dan tetap berada pada jalur tujuan program. Namun, pada fase awal implementasi muncul dinamika yang cukup signifikan berupa penundaan dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya selaras dengan rencana kerja, terutama pada kegiatan aksi langsung di lapangan (seperti penanaman) dan kegiatan fisik lainnya. Meski demikian, memasuki akhir tahun 2025, proyek menunjukkan kemampuan mengejar ketertinggalan, khususnya melalui percepatan penyusunan dan penyelesaian berbagai dokumen strategis yang menjadi prasyarat pelaksanaan tahap berikutnya.

Pada semester pertama pelaksanaan, sejumlah target utama belum terealisasi, antara lain penyusunan Rencana Teknis (Rantek) RHL, revisi RPHJP KPH, serta pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Keterlambatan ini terutama dipengaruhi oleh tantangan sinkronisasi jadwal dan skala prioritas kegiatan lintas pihak, yang pada praktiknya memerlukan penyesuaian berulang. Selain itu, dimulainya program yang bertepatan dengan akhir tahun anggaran 2024 turut berdampak pada penumpukan beban kerja di awal tahun 2025, sehingga realisasi anggaran pada semester pertama masih relatif rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan.



Hambatan lain muncul dalam tahap pelaksanaan, terutama pada proses menerjemahkan perencanaan dalam proposal yang masih bersifat umum menjadi kebutuhan implementasi yang rinci di tingkat tapak. Penentuan lokus kegiatan membutuhkan verifikasi, klarifikasi, dan pendalaman data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta sesuai kondisi lapangan. Konsekuensinya, proses berjalan lebih panjang karena harus melalui tahapan penetapan prioritas, pemenuhan persyaratan teknis, serta mekanisme persetujuan dari para pihak terkait sebelum kegiatan dapat dieksekusi. Pada saat yang sama, penerapan pendekatan partisipatif PADIATAPA/FPIC—sebagai prasyarat penting sebelum penanaman—memerlukan waktu yang lebih panjang untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan dengan masyarakat.

Walaupun sebagian kegiatan fisik belum terlaksana sesuai rencana awal, proyek ini mampu menutup tahun 2025 dengan capaian substansial pada penguatan fondasi administratif dan arsitektur REDD+ di tingkat provinsi. Proyek berhasil merampungkan 40 dokumen Rantek RHL (20 pada lahan mineral dan 20 pada lahan gambut), serta menyusun dokumen kunci seperti FREL/FRL subnasional, Summary of Safeguards SIS-REDD+, dan Rencana Aksi REDD+. Dengan capaian tersebut, pada tahun pertama pelaksanaan proyek telah terbentuk kerangka kebijakan, perencanaan, dan perangkat dasar yang diperlukan untuk memastikan REDD+ berjalan lebih terarah dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, tantangan ke depan tetap menuntut penguatan sinkronisasi ritme kerja antara lembaga pelaksana dan pemerintah daerah agar keterlambatan kegiatan fisik di lapangan tidak kembali berulang pada periode berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 proyek akan melanjutkan kegiatan yang belum terlaksana sekaligus mengoptimalkan kegiatan yang telah dimulai agar hasilnya lebih nyata di tingkat tapak. Penyesuaian perencanaan juga akan dilakukan secara selektif apabila terdapat kegiatan yang dinilai kurang relevan, membutuhkan penguatan desain, atau memungkinkan efisiensi pelaksanaan. Sejalan dengan itu, pembaruan kertas kerja dan dokumen pendukung akan disusun sesuai kebutuhan implementasi, sehingga pelaksanaan tahun berikutnya dapat berlangsung lebih fokus, responsif terhadap kondisi lapangan, dan tetap konsisten dengan target serta keluaran program.



Lampiran

Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program Provinsi Kalimantan Tengah dalam Excel

[Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program_KP II_\(Kalteng\)_2024-2025.xlsx](#)

Lampiran 2. Link Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (Link Google Drive)

Kode Kegiatan	Link Dokumen
1.1.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1uWr7spl3M8D60_jkBiDsT23CyW1uAity?usp=drive_link
1.1.1.2	https://drive.google.com/drive/folders/1a1zrQeH8reykvmrc2wQ8fi6b9qWM_5x_?usp=drive_link
1.1.1.5	https://drive.google.com/drive/folders/1sTXc-Td02yXZIBG5LsITWyD1Y8OdITs5?usp=drive_link
1.1.2.1	https://drive.google.com/drive/folders/10xXaiT80AXWQnRoOGa1QfIdnesZ_R2WR?usp=drive_link
1.1.2.2	https://drive.google.com/drive/folders/16jq1QAz9g2_4PPUPzSz9xpb6hOVws9Pb?usp=drive_link
1.1.2.5	https://drive.google.com/drive/folders/1ghUuHMHVDkhnuhMsrbOsAeaWI1Sdb3Ce?usp=drive_link
1.2.1	https://drive.google.com/drive/folders/1pZibONMaROcbGvsjkhPlyXIOOC0QHkQU?usp=drive_link
1.2.2	https://drive.google.com/drive/folders/1wg1BdeZp1pQwOZOhotiR7aG6MRcle6cu?usp=drive_link
2.1.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1HIP7j3i9G14Xxp5v-QE33xD6FX_FngS?usp=drive_link
2.1.1.2	https://drive.google.com/drive/folders/1V2xmdHzzyxsZ_OsmZB8FLFX1FzmrwLNH?usp=drive_link
2.1.2.1	https://drive.google.com/drive/folders/1NbW1l4UrqRLSiXmK1BpGEXT7_-6BijfM?usp=drive_link
2.1.2.2	https://drive.google.com/drive/folders/1xaDS2FntwmBLQ1NgDo9YqythqBMwstzp?usp=drive_link
2.1.2.3	https://drive.google.com/drive/folders/1oSQ4dKPxHDsrmRDE0na4aPbC2NmaEuHy?usp=drive_link
2.1.2.4	https://drive.google.com/drive/folders/13sfa21n8hG9TYJ5xZWGhoQFJBjW6l3fu?usp=drive_link
2.2.1	https://drive.google.com/drive/folders/1-RDfs5cloOSIB90gtClXvmLO5Fg7vaxY?usp=drive_link
2.2.3	https://drive.google.com/drive/folders/1ZP85dT0PjOX-YPSq-VWC7LqmB2qQQSII?usp=drive_link
4.1.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1UGfY17YW2E_ZUn4iMwfxiX_ISXvYoQ2d?usp=drive_link
4.1.1.2	https://drive.google.com/drive/folders/1HTHTrPBno7guLZcS9p24X9Sqh93P_J5l?usp=drive_link
4.1.2.1	https://drive.google.com/drive/folders/14vLVxYYmq8uogrbpaRJ Tig7vqXZKzJdA?usp=drive_link
4.1.2.2	https://drive.google.com/drive/folders/1fdl3eQC-N9tk5-DSQWxYoLLYUwXdskQ?usp=drive_link
4.1.3.1	https://drive.google.com/drive/folders/1tljZCnuV8JkpmwM3E0kEdnPRunuCDyK?usp=drive_link



4.1.3.2	https://drive.google.com/drive/folders/1QJsW1-5fjPzHTmTFg4k0EBLmY01-Uoo8?usp=drive_link
4.1.3.3	https://drive.google.com/drive/folders/1-N1d2RgLNrNmW7MbPUaF-MTVUz4HYa?usp=drive_link
4.2.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1hwrqVwt7SDLUV8lsBa6AWktDPRDWfB7s?usp=drive_link
4.2.1.2	https://drive.google.com/drive/folders/1TFvWwkoV2hngfMDqhdU7nWnse-vcV4rQ?usp=drive_link
4.2.1.4	https://drive.google.com/drive/folders/1950JDcfxKAqPNHjH8JuXRwwh2TF3ETeH?usp=drive_link
4.2.1.5	https://drive.google.com/drive/folders/1ZZ9fv7StkOTwOoxQC7PcA7N3xnn-IYVs?usp=drive_link
4.2.2.2	https://drive.google.com/drive/folders/1I10eiUZMXvsRYD6sBiDkotYs8ClbQSuB?usp=drive_link
4.2.2.3	https://drive.google.com/drive/folders/11fYnCoT2ZOWOTPMsqXH76sHak6Ra8xEw?usp=drive_link
4.2.2.4	https://drive.google.com/drive/folders/14EX_p_3D3hwjsO9MN5FxbIjZyVoCBBmW?usp=drive_link
4.2.2.6	https://drive.google.com/drive/folders/168q61_KCivFgyeU-98jCacpHjmP0sgKO?usp=drive_link
4.2.2.7	https://drive.google.com/drive/folders/1IQpf45CFBTZTZg0q6D-4DDN6BDnXaySM?usp=drive_link
4.2.3.1	https://drive.google.com/drive/folders/1RCqXbl13CabvF8eUOnN-ndnl43ZLyFO9?usp=drive_link
4.2.3.2	https://drive.google.com/drive/folders/1FMyMYyn-c_vH-eb2IsW5k9_SKPxGoll2?usp=drive_link
4.2.4.7	https://drive.google.com/drive/folders/1hITrbKIWiUTPtjYerBMseaxcBQdU3wEY?usp=drive_link
4.2.5.1	https://drive.google.com/drive/folders/1Qd0kYkkUTlbqeAa5V0fGeS7vztxf2UQL?usp=drive_link
4.2.5.3	https://drive.google.com/drive/folders/1SFqh78AAsNaFG96L2KcNGsTUbBOIW_IE?usp=drive_link
4.2.6.1	https://drive.google.com/drive/folders/1WK2Ow0fYv2rYJxsmGpS4Wn_AKj1pPF7N?usp=drive_link
4.2.6.2	https://drive.google.com/drive/folders/1RvtmF7SuxyUgTYRvChnte4mrO8WOsg3w?usp=drive_link
4.3.1	https://drive.google.com/drive/folders/1tvWleQVB0-K5IkeDv5DzkfrV_XD3UQ5j?usp=drive_link
4.3.3.1	https://drive.google.com/drive/folders/1m5Tm4VOVrrLT4uY8cBu0gXoXoYP_e3RKd?usp=drive_link
4.3.3.2	https://drive.google.com/drive/folders/1wca2D9JES5FZGqXw2zQISucb6lk3Q34Q?usp=drive_link
4.3.4.1	https://drive.google.com/drive/folders/1xn37HyYi4Lia_btiosXATX34hDe9JYCZ?usp=drive_link
Monev	https://drive.google.com/drive/folders/1hOuMcZUiwZnppclt7qqpra9pLqf33oQI?usp=drive_link